

**INTERKONEKSITAS KELEMBAGAAN DALAM MENDUKUNG  
KEBERLANJUTAN AGRIBISNIS CENGKEH**  
*(Studi Kasus Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan)*

**INSTITUTIONAL INTERCONNECTIVITY IN SUPPORTING CLOVE  
AGRIBUSINESS SUSTAINABILITY**  
*(Case Study of East Tidore District, Tidore Islands City)*

**NUR AZIZAH HS**



**PROGRAM STUDI ILMU PERTANIAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2019**



**INTERKONEKSITAS KELEMBAGAAN DALAM MENDUKUNG  
KEBERLANJUTAN AGRIBISNIS CENGKEH  
(Studi Kasus Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan)**

**Disertasi**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Doktor

Program Studi Ilmu Kedokteran

Disusun dan diajukan oleh

**NUR AZIZAH HS**

**Kepada:**

**PROGRAM STUDI ILMU PERTANIAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2019**



## DISERTASI

### INTERKONEKSITAS KELEMBAGAAN DALAM MENDUKUNG KEBERLANJUTAN AGRIBISNIS CENGKEH (Studi Kasus Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan)

Disusun dan diajukan oleh

**NUR AZIZAH HS**  
Nomor Pokok P0100315407

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Disertasi  
pada tanggal 31 Desember 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Penasehat,



**Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, MS**  
Promotor



**Dr. Ir. Imam Mujahidin Fahmid, MTD**  
Ko-Promotor



**Ir. Muhammad Arsyad, SP. M.Si. Ph.D**  
Ko-Promotor

Ketua Program Studi  
Ilmu Pertanian



**Dr. Darmawan Salman, MS**

Dekan Sekolah Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**



## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR AZIZAH HS

Nomor Mahasiswa : P0100315407

Program Studi : Ilmu Pertanian

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Desember 2019

Yang menyatakan

**NUR AZIZAH HS**



## PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga disertasi ini dapat terselesaikan. Disertasi ini berjudul Interkeonektivitas Kelembagaan dalam Mendukung Keberlanjutan Agribisnis Cengkeh (Studi Kasus Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan). Disertasi ini disusun sebagai respon terhadap kondisi pengelolaan agribisnis cengkeh yang semakin terancam keberlanjutannya.

Penyusunan disertasi ini selain berkat adanya kerja keras peneliti juga tidak lepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak. Penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat: Prof.Dr.Ir. Sitti Bulkis MS sebagai promotor serta Dr.Ir. Imam Mujahidin Fahmid, MTD dan Muhammad Arsyad, SP, M.Si, Ph.D masing-masing sebagai co-promotor. Selama proses penelitian telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bimbingan yang sangat berharga sehingga selain memudahkan, juga memberi motivasi pada penulis untuk melakukan inovasi dalam mengeksplor guna memperkaya dan mempertajam substansi disertasi.

Ucapan terima kasih penulis juga peruntukan kepada Prof.Dr.Ir. Didi Rukmana, M.S., Prof.Dr.Ir. Darmawan Salman, MS, Dr. Ir. Mahyuddin, M.Si, Ahmadanih, M.Si, masing-masing sebagai penguji pada saat seminar,. rangkaian kegiatan tersebut tim penguji telah memberikan kritikan



dan masukan yang sangat berharga sehingga disertasi ini telah mengalami perbaikan substansi yang sangat signifikan. Kepada rekan-rekan mahasiswa Rekan-rekan mahasiswa S3 Pascasarja Unhas Angkatan 2015 (Astutiirundu, St.Aisyah, Ria Indriani, Supriyo Imran, Ruzkiah, Andi Santi, Sulaeman, Affandi Ahmad, saya menyampaikan terima atas kebersamaan dan saling mendukung selama proses perkuliahan hingga penyelesaian studi. Satu sama lain saling belajar dan memberi semangat sehingga terbangun kapasitas dan berbagai hambatan menjadi lebih ringan. Kepada Dr. Ir. Marhawati, M.Si, Dr. Ir. Awaluddin, M.Si dan Dr.Yusmiati Sabang, SP, M.Si saya juga menyampaikan terima kasih yang mendalam atas bantuannya selama penulisan disertasi.

Kepada kedua orang tua yang tercinta (alm Herman Soekatman dan almh Naeny Irma), teriring penghargaan dan terima kasih yang sangat mendalam atas jasa-jasanya mendidik anakda semasa masih hidup. Meskipun tidak sempat menyaksikan penulis menempuh studi program doktor, namun sungguh telah memberi bimbingan yang sangat berharga sehingga menjadi modal atau bekal yang luar biasa dalam menjalani hidup termasuk dalam penyusunan disertasi ini. Karya disertasi inipun penulis persembahkan kepada beliau berdua dan semoga menjadi amal jariah dari

VT. Kepada saudara-saudaraku (Nur Hidayah, Amd, dan Nazaruddin S.Sos), penulis juga sampaikan terima kasih yang mendalam atas dukungan moril dan bantuannya selama menempuh studi.



Kepada kedua mertua (alm Abdullah Maulud dan almh Asma Mahmud ), teriring penghargaan dan terima kasih yang sangat mendalam atas jasa-jasanya memberikan doa dan dukungannya semasa masih hidup. Begitupula kepada adik ipar (Farida Abdullah,S.Pd, Rusni Abdullah, SE, Samsul Maulud,S.Pd dan Warsiman), penulis ucapkan terima kasih atas dorongan dan dukungannya selama penyusunan disertasi ini.

Terakhir kepada suami tercinta Tamrin Abdullah,S.Pd dan anakku tersayang Muammar Rifqi, penulis haturkan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas dorongan semangat, pengertian dan kesabaran selama penyusunan disertasi ini. Untuk itu segala capaian melalui studi ini saya peruntukan buat keluarga tercinta, semoga dapat menjadi inspirasi dan sumber semangat untuk juga terus menapaki jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan bermartabat demi semata-mata mengabdikan kepada Allah SWT. Sebagai penutup prakata ini, penulis memohon kepada Allah SWT semoga senantiasa melimpahkan hidayahNya dan imbalan amal kebaikan kepada semua pihak yang telah disebutkan di atas, termasuk yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu. Penulis menyadari pula disertasi ini belumlah sepenuhnya sempurna, untuk itu dengan lapang dada berharap terus mendapatkan

dan saran atau pengembangan sehingga makin lebih berkualitas.

Wassalam,

Penulis



## ,ABSTRAK

NUR AZIZAH. Interkoneksi Kelembagaan dalam Mendukung Keberlanjutan Agribisnis Cengkeh (Studi kasus, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan (dibimbing oleh Sitti Bulkis, Imam Mujahidin Fahmid dan Muhammad Arsyad).

Pengelolaan agribisnis cengkeh memerlukan upaya perbaikan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peranan kelembagaan yang terlibat dalam agribisnis cengkeh, menganalisis interkoneksi kelembagaan agribisnis cengkeh, menganalisis keberlanjutan agribisnis cengkeh. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tidore Kepulauan selama sepuluh bulan, November 2017- Agustus 2018.. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis stakeholder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kelembagaan yang terlibat agribisnis cengkeh meliputi : Kelompok tani berperan sebagai wadah kerjasama dalam kegiatan pemeliharaan dan panen cengkeh, Gapoktan berperan sebagai wadah mediasi perpanjangan program pemerintah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan dibidang pertanian. Dinas Pertanian berperan dalam memudahkan petani dalam kegiatan berusaha tani cengkeh melalui berbagai kegiatan diantaranya pemberian bantuan bibit cengkeh siap tanam, dan penyediaan infrastruktur jalan, Dinas Perindagkop dan UKM berperan dalam kegiatan pengawasan penggunaan alat ukur, takar dan timbang bagi perdagangan kebutuhan pangan dan perdagangan kopra, Badan Penyuluh pertanian berperan sebagai lembaga penyampai kebijakan-kebijakan pemerintah, belum menyentuh pada pengembangan agribisnis cengkeh. Peran Perumda berperan dalam melakukan kegiatan pembelian cengkeh dengan harga yang berlaku di Ternate. Pedagang saprodi berperan dalam menyediakan sarana produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan dan alat-alat pertanian. Peran pedagang pengumpul pada subsistem hilir adalah melakukan kegiatan pembelian hasil produk cengkeh dari petani. Interkoneksi kelembagaan membentuk 3 (tiga) kategori jaringan sosial yang meliputi Interkoneksi antar kelembagaan yang terlibat dalam agribisnis membentuk 3 (tiga) kategori jaringan sosial yang meliputi : jaringan sentiment, jaringan sosial kepentingan, jaringan sosial kekuasaan. Pengelolaan agribisnis cengkeh dapat memberikan keberlanjutan dari aspek sosial, ekonomi dan ekologi.

Kata Kunci : Interkoneksi, Kelembagaan, Agribisnis, Cengkeh





## ABSTRACT

**NUR AZIZAH HS.** *Institutional Interconnection in Supporting Sustainability of Clove Agribusiness : A Case Study in East Tidore District, Tidore Islands City* (Supervised by **Sitti Bulkis, Imam Mujahidin Fahmid, and Muhammad Arsyad**)

Agribusiness management requires institutional improvement efforts. This study aims to analyze the role of clove agribusiness institutions in the city of Tidore islands, analyze the interconnection of clove agribusiness institutions in the city of Tidore islands, and analyze the sustainability of agribusiness in the city of Tidore islands.

This research was conducted in the city of Tidore islands for ten months, from November 2017 to August 2018. The research method used was a descriptive qualitative method using stakeholder analysis.

The results show that the institutional roles involved in clove agribusiness include: Farmer groups that act as a forum for cooperation in clove harvesting and maintenance activities, Gapoktan which acts as a mediating medium for the extension of government programs in carrying out policies in agriculture. The Department of Agriculture has a role in facilitating farmers in clove farming activities through various activities including the provision of clove seedlings ready for planting and the provision of road infrastructure. The Department of Industry and Trade and SMEs play a role in supervising the use of measuring instruments, measuring and weighing for traders in the need for food and copra trade. Agricultural extension workers who play a role in delivering government policies, have not yet touched on the development of clove agribusiness. Perunda plays a role in buying clove at a price that prevails in Ternate. Saprodu traders play a role in providing production facilities such as seeds, fertilizers, medicines and agricultural equipment. The role of the traders in the downstream subsystem is to carry out activities of purchasing clove production from farmers. Institutional interconnection forms 3 (three) social network categories which include sentiment networks, social networks of interests, and social networks of power. Clove agribusiness management can provide sustainability from social, economic and ecological aspects.

Keywords: Interconnectivity, Institutions, Clove Agribusiness



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	21
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Konsep Interkoneksi Kelembagaan.....	22
B. Stakeholder... ..	42
C. Keberlanjutan Cengkeh.....	44
D. Agribisnis Cengkeh.....	52
E. Kerangka Pemikiran.....	62
F. Defenisi Konsep.....	68
III. METODE PENELITIAN.....	71
A. Paradigma dan Pendekatan Penelitian.....	71
B. Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti.....	73
Lokasi dan Waktu Penelitian.....	74
Penentuan Informan Penelitian.....	74
Jenis dan Sumber data.....	73



F. Metode Pengumpulan Data.....	78
G. Teknik Analisis Data.....	79
H. Pengecekan Validitas Temuan/Kesimpulan .....	85
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	86
A. Gambaran Umum Wilayah.....	86
1. Letak Geografis.....	86
2. Jumlah Penduduk.....	90
3. Potensi Bidang Pertanian.....	91
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	94
B. Gambaran Umum Kelembagaan	
Agribisnis.....	95
1. Kelompok Tani.....	95
2. Gabungan KelompokTani.....	101
3. Dinas Pertanian.....	102
4. Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM	105
5. Balai Penyuluhan Pertanian.....	107
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	113
A. Peranan Kelembagaan Agribisnis Cengkeh.....	113
1. Kelompok Tani .....	114
2. Gapoktan .....	151
3. Dinas Pertanian.....	158
4. Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM	164
5. Balai Penyuluh Pertanian.....	169
6. Perumda Aman Mandiri.....	174
7. Kantor Kelurahan .....	176
8. Perguruan Tinggi.....	178
9. Pedagang Sarana Produksi (Saprodi).....	180



10. Pedagang Pengumpul.....	185
B. Interkoneksi Kelembagaan Agribisnis Cengkeh .....	200
1. Identifikasi Stakeholder dalam Kelembagaan Agribisnis Cengkeh.....	201
a. Stakeholder Primer.....	203
b. Stakeholder Kunci.....	203
c. Stakeholder Sekunder .....	204
2. Pengategorisasian Stakeholder.....	204
3. Keterkaitan Hubungan Kelembagaan Agribisnis Cengkeh.....	212
4. Rancangan Model Interkoneksi Kelembagaan Agribisnis.....	229
C. Keberlanjutan Agribisnis Cengkeh.....	237
1. Keberlanjutan Ekonomi.....	237
2. Keberlanjutan Sosial.....	242
3. Keberlanjutan Lingkungan.....	246
VI. PENUTUP.....	250
A. Kesimpulan.....	250
B. Implikasi Teori.....	252
C. Implikasi Kebijakan.....	258

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Luas Areal, Jumlah Produksi dan Harga Cengkeh di Tidore Kepulauan Tahun Tahun 2010 – 2018 .....	8
2. Jumlah PohonCengkeh yang Mati PerKecamatan Di Tidore Kepulauan.....	9
3. Luas Wilayah Kecamatan Tidore Timur Berdasarkan Kelurahan Tahun 2019.....	89
4. Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan TidoreTimur, 2019.....	90
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kecamatan Tidore Timur.....	91
6. Luas Lahan dan Produksi Tanaman Pangan dan Sayur-Sayuran Kecamatan Tidore Timur, 2019.....	92
7. Luas Lahan dan Produksi Komoditas Buah-Buahan Kecamatan Tidore Timur.....	92
8. Luas Lahan dan Produksi Tanaman Perkebunan Kecamatan Tidore Timur.....	93
9. Sarana Pendidikan Kecamatan Tidore Timur.....	94
10. Jumlah Anggota dan Susunan Kepengurusan Kelompok Tani di Kecamatan Tidore Timur, 2019.....	95
11. Jumlah Peralatan Usahatani Yang Dimiliki Kelompok Tani di Kecamatan Tidore Timur, 2019.....	98
12. Norma, Aturan dan Pemahaman Informan Yang Berlaku di Tidore Kepulauan.....	100
13. Jumlah dan Kepengurusan Gapoktan di Kecamatan Tidore Timur, 2019 .....	102



14. Jumlah Penyuluh Pertanian di Kecamatan Tidore Timur,2019...	109
15. Karakteristik Ketua Kelompok Tani, 2019.....	116
16. Matriks Peran Kelompok Tani Terhadap Anggota dalam Agribisnis Cengkeh di Kecamatan Tidore Timur, 201 .....	139
17. Peranan Dinas Pertanian Terhadap Keompok Tani Kota Tidore Kepulauan, 2019.....	162
18. Peranan Deprindagkop dan UKM, Tidore Kepulauan, 2019.....	167
19. Laporan Pembelian Cengkeh Per November 2019 oleh Perumda, 2019 .....	172
20. Jumlah Pedagang Sarana Produksi di Kota Tidore Kepulauan, 2019.....	181
21. Jumlah Pedagang Pengumpul Cengkeh di Kota Tidore Kepulauan, 2019.....	190
22. Matriks PerananKelembagaan dalam Agribisnis Cengkeh, 2019 ..	198
23. Stakeholder yang Terlibat dalam Pengelolaan Cengkeh di Tidore Kepulauan, 2019.....	202
24. Tingkat Kepentingan dan Pengaruh stakeholder dalam Agribisnis cengkeh di Tidore Kepulauan, 2019.....	205
25. Pengukuran Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder dalam Pengelolaan Cengkeh di Kota Tidore, 2019.....	207
26. Keterkaitan Hubungan Antara Stakeholder berdasarkan Tingkat Kepentingan dan Pengaruh dalam Agribisnis Cengkeh di Tidore, 2019.....	215
27. Matriks Interkoneksi Antar Lembaga dalam Pengelolaan Agribisnis Cengkeh, 2019.....	217
28. Rata-rata Penerimaan, Biaya dan Pendapatan Usahatani Cengkeh diKota Tidore Kepulauan,2019.....	239



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Kontribusi Setiap Sektor (dalam %) Terhadap PDB Nasional Tahun 2015.....	3
2. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDB Nasional Tahun 2015.....	4
3. Kontribusi Tanaman Perkebunan Terhadap Sektor Pertanian Tahun 2014.....	4
4. Kerangka Teori Jaringan.....	26
5. Kerangka Pikir Penelitian.....	67
6. Matriks Analisis Stakeholder Gird.....	83
7. Sketsa Lokasi Penelitian. ....	88
8. Peralatan Panen Cengkeh .....	118
9. Buah Cengkeh Siap Panen .....	145
10. Joko-joko yang dibuat Petani diatas Pohon Cengkeh.....	147
11. Kegiatan Pemisahan Bunga Cengkeh dari gagangnya.....	148
12. Kegiatan Penjemuran Cengkeh.....	149
13. Kegiatan Penjemuran Gagang Cengkeh.....	150
14. Akses Jalan Menuju Lokasi Pertanaman Cengkeh.....	160
15. Lokasi Gerai Maritim Tol Laut Tidore Kepulauan,2019...	166
16. Lokasi Tempat Pembelian dan Penimbangan Hasil	



Pertanian Milik Perumda Aman Mandiri, Tidore Kepulauan, 2019	175
17. Toko/Kios Tani di Tidore Kepulauan, 2019.....	184
18. Saluran Pemasaran Cengkeh di Tidore Kepulauan, 2019.....	186
19. Kegiatan Perdagangan Cengkeh di Tidore Kepulauan, 2019...	189
20. Pedagang Pengumpul di Tidore Kepulauan, 2019.....	191
21. Pemetaan stakeholder berdasarkan Tingkat Kepentingan dan Pengaruh dalam pengelolaan cengkeh di Tidore Kepulauan, 2018.....	210
22. Interkoneksi Kelembagaan Agribisnis Cengkeh Tidore Kepulauan, 2019.....	228
23. Rancangan Model Interkoneksi Kelembagaan Agribisnis Cengkeh.....	232





## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Perhitungan Tingkat Pengaruh Stakeholder Agribisnis Cengkeh	279
2. Perhitungan Tingkat Kepentingan Stakeholder Agribisnis Cengkeh .....	280
3. Kriteria Penilaian Tingkat Pengaruh Stakeholder dalam pengelolaan Agribisnis Cengkeh .....	281
4. Kriteria Penilaian Tingkat Kepentingan Stakeholder dalam pengelolaan Agribisnis Cengkeh .....	282
5. Karakteristik Informan Usahatani Cengkeh Di Tidore Kepulauan... ..	283
6. Analisis Biaya dan Pendapatan Usahatani Cengkeh Di Tidore Kepulauan... ..	284
7. Struktur Organisasi Kelompok Tani.....	285
8. Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Tidore Timur.....	286
9. Struktur Organisasi Gapoktan di Tidore Kepulauan.....	287
10. Struktur Organisasi Perumda Aman Mandiri.....	288
11. Struktur Organisasi BPP Kecamatan Tidore Timur.....	289
12. Karakteristik 7 (tujuh) Kelompok Tani Sebagai Informan Dalam Kegiatan Agribisnis Cengkeh di Tidore Kepulauan, 2019...	290
13. Struktur Organisasi Deperindagkop dan UKM .....	294
I. Struktur Organisasi Dinas Pertanian.....	295
II. Struktur Organisasi Universitas Nuku.....	296



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sejarah kejayaan Indonesia sebagai satu-satunya penghasil cengkeh dunia sudah sejak abad ke 18. Habitat asli cengkeh berada di 5 (lima) pulau di Maluku Utara yaitu Ternate, Tidore, Bacan, Makian dan Moti. Cengkeh banyak diminati sebagai pengawet bahan makanan yang akhirnya memunculkan satu babakan paling mengenaskan dalam sejarah politik dunia, yakni zaman penjajahan Eropa terhadap bangsa-bangsa di Asia, termasuk Indonesia (Puthut, 2013). Lambat laun peran utama cengkeh sebagai rempah-rempah Maluku mulai tergusur dengan adanya penemuan teknologi mesin dingin, namun tak dapat dipungkiri bahwa sejarah mencatat cengkeh Maluku itulah yang mengawali penjelajahan sekaligus penjajahan kepulauan Nusantara oleh bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda (Topatimasang, 2004).

Cengkeh merupakan tanaman perkebunan yang memiliki peran penting dan strategis serta mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi Indonesia. Cengkeh berkontribusi nyata dalam penyediaan kebutuhan bahan baku bagi industri rokok kretek, karena sebagian besar hasil cengkeh digunakan sebagai bahan pembuatan rokok kretek, sisanya cengkeh dimanfaatkan untuk industri farmasi dan obat-obatan (Nurdjanna, 2007). Perkembangan industri rokok



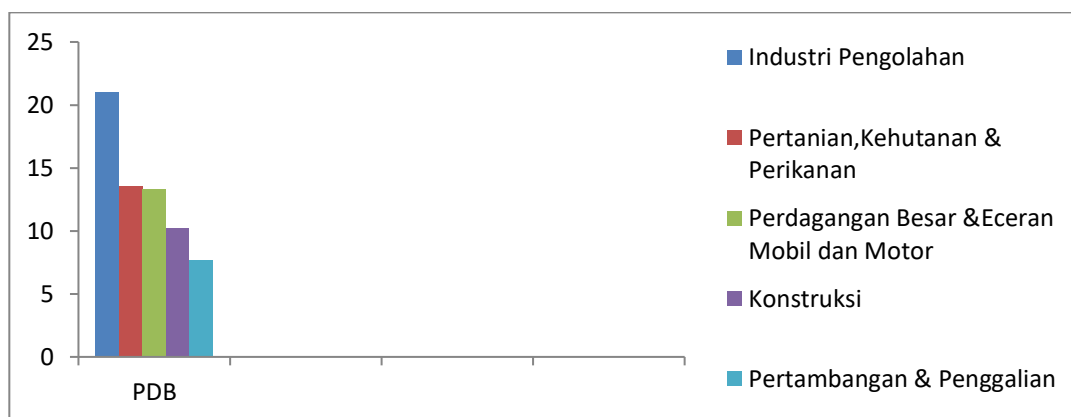
kretek memberikan kontribusi pendapatan bagi negara sebesar Rp.138,69 triliun atau 96,65 persen dari total cukai nasional untuk tahun 2016 (Dirjen perkebunan, 2017). Cengkeh juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja yang setiap tahunnya mencapai sebesar Rp. 3 juta orang (Rukmana dan Yudirachman, 2016) dan peningkatan devisa negara yakni sebesar Rp. 30.687 juta pada tahun 2013 menjadi Rp. 37.123 juta tahun 2014 (Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019). Selain itu sekitar 80% bagian bunga, gagang dan daun cengkeh dapat menghasilkan minyak cengkeh yang mengandung eugenol (Litbangtan, 2007). Disisi lain, pemanfaatan minyak cengkeh sebagai anti bakteri alami berguna untuk pengobatan penyakit gigi (Andries *et al.*, 2014), senyawa eugenol sebagai antioksidan dalam minyak jagung (Nurjannah, 2013), agen larvicidal dalam pengobatan penyakit demam berdarah (Rojas dan Oliveira, 2014) serta dapat mengendalikan oksidasi lipid dalam makanan (Embuscado, 2015).

Tanaman cengkeh memberikan kontribusi pendapatan bagi sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian dalam arti sempit (diluar Perikanan dan Kehutanan) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2015 yaitu sekitar 906,804.50 milyar rupiah atau 13,49 persen dari PDB nasional yang besarnya 8,982.511,30 milyar rupiah (berdasarkan harga konstan tahun

(Kementrian Pertanian, 2016). Sub sektor tanaman perkebunan memberikan kontribusi terbesar diantara sub sektor yang lain terhadap PDB nasional tahun 2015 dari kontribusi sektor pertanian yakni



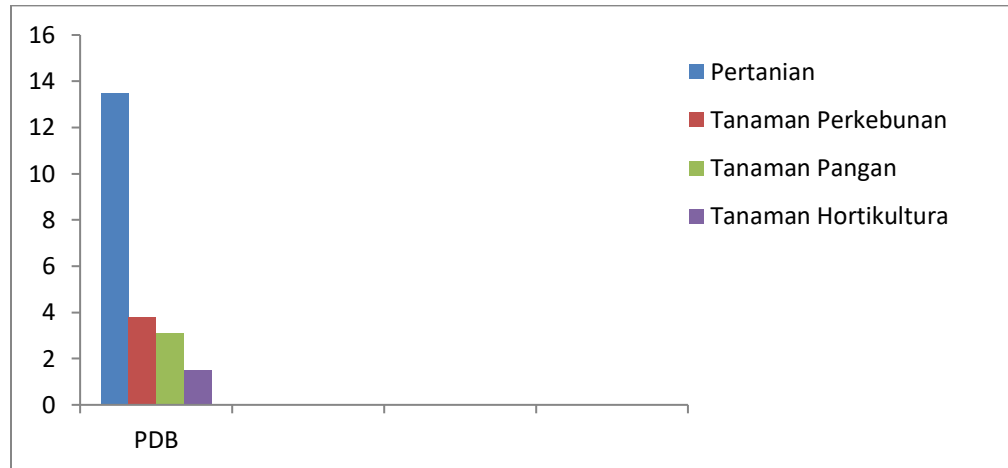
sebesar Rp. 345,164.90 milyar atau 3,80 % (berdasarkan harga konstan tahun 2010). Sedangkan kontribusi cengkeh sebagai komoditas pada sub sektor perkebunan tahun 2014 menyumbangkan sebesar 2,367 milyar rupiah atau 0,70 persen terhadap PDB nasional (Kementan Pertanian, 2015) pada gambar 1 berikut:



**Gambar 1.** Kontribusi Setiap Sektor (%) terhadap PDB Nasional Tahun 2015

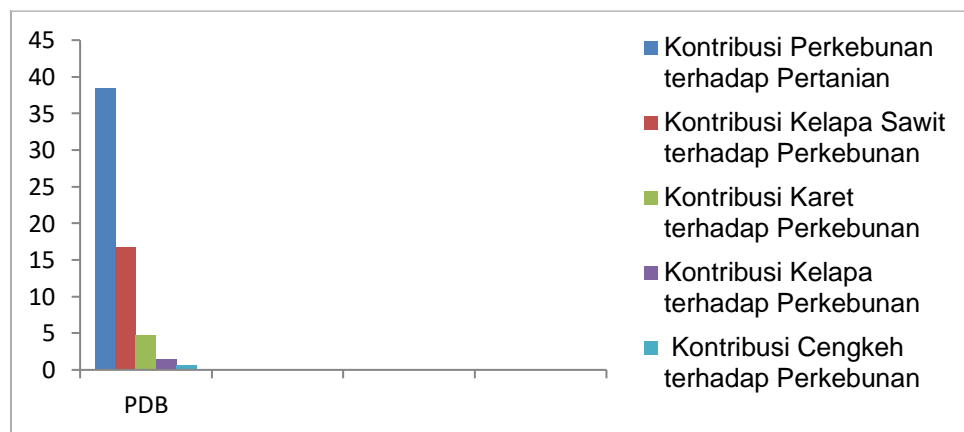
Sektor pertanian memberikan kontribusi yang kedua setelah industri pengolahan yakni sebesar 906.804.50 milyar rupiah atau sekitar 13,49 persen dari total PDB nasional. Besarnya kontribusi tanaman hortikultura, pangan dan perkebunan terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian dapat dilihat pada gambar 2 berikut :





**Gambar 2.** Kontribusi Sektor Pertanian (%) terhadap PDB Nasional Tahun 2015.

Sub sektor tanaman perkebunan memberikan kontribusi terbesar yakni sebesar 345.164,90 milyar rupiah atau 3.80 persen dari PDB sektor pertanian.



**Gambar 3.** Kontribusi Tanaman Perkebunan (%) terhadap Sektor Pertanian, 2014

Kontribusi tanaman cengkeh terhadap PDB nasional rendah, namun demikian bagi wilayah Tidore keberadaan cengkeh sebagai komoditas berpengaruh besar terhadap kesejahteraan hidup masyarakat.



Sektor Pertanian memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Kota Tidore Kepulauan terlihat dari sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2012 sebesar 50,91% (BPS, 2013). Dengan demikian, sektor pertanian menjadi sektor unggulan bagi peningkatan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.

Pulau Tidore merupakan salah satu daerah pusat rempah-rempah yaitu cengkeh yang sudah dikenal sejak masa penjajahan Portugis. Kegiatan agribisnis cengkeh berperan sebagai sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat dengan luas areal keseluruhan sebesar 1.420 ha dari total luas daratan wilayah Tidore sebesar 9.116,36 km<sup>2</sup> (RPJMD, 2016-2021) dengan jumlah produksi yang diperoleh sebesar 1.288 ton yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah tanaman kelapa untuk sektor perkebunan (BPS, 2017).

Adanya ketersediaan potensi sumberdaya alam dengan kondisi tanah yang mendukung pertumbuhan tanaman cengkeh, maka diperlukan upaya dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat dalam pengembangan agribisnis cengkeh. Agribisnis sangat diperlukan dalam pengembangan agribisnis cengkeh, oleh karena kenyataannya produksi yang diperoleh masih rendah serta menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan solusi

berlanjutan agribisnis cengkeh dimasa yang akan datang. Agribisnis tanaman bisnis dibidang pertanian, namun secara luas agribisnis diartikan keseluruhan aktivitas produksi dan distribusi sarana produksi usaha



tani, aktivitas usaha tani, serta penyimpanan, pengolahan, distribusi komoditas usaha tani, dan aktivitas lain yang membentuk produk tersebut.

Menurut Soekartawi (1999), bahwa secara umum agribisnis dapat dipandang dari dua segi, yaitu agribisnis sebagai suatu sistem terdiri dari subsistem penyediaan input, subsistem produksi sampai sub sistem pemasaran dan subsistem penunjang dan agribisnis sebagai suatu bidang usaha atau perusahaan pertanian adalah suatu institusi atau organisasi bisnis yang berusaha didalam salah satu subsistem, beberapa subsistem atau secara terpadu total didalam sistem agribisnis yang dikelola dengan keterampilan manajerial yang baik untuk meraih keuntungan, materiil maupun moril.

Permasalahan agribisnis cengkeh berkaitan dengan keberadaan BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh) dimasa yang lalu tepatnya pada tahun 1991. Berdasarkan SK Menteri Perdagangan RI No.306/KP/1990 tentang Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri maka dibentuklah BPPC sejak 1 Januari 1991 sebagai peiaksana tata niaga cengkeh yaitu satu-satunya pembeli cengkeh yang dihasilkan petani . dan satu-satunya penjual cengkeh ke Pabrik Rokok Kretek dan pengguna cengkeh lainnya (Gonarsyah et. al. , 1996). BPPC sebagai satu-satunya pembeli cengkeh dari petani, akhirnya memainkan harga. BPPC membeli cengkeh dari

dengan harga yang semurah-murahnya sempat mencapai harga Rp  
dan menjual dengan harga semahal-mahalnya kepada industri rokok  
Pada saat BPPC belum terbentuk, harga terendah cengkeh adalah Rp



20 ribu per kilogram. Setelah BPPC terbentuk harga cengkeh turun drastis hingga Rp 2 ribu per kilogram. Seketika, cengkeh yang tadinya emas, menjadi onggokan rempah tak berharga. Pada kondisi monopoli, BPPC juga mendapat kredit dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sebesar Rp. 569 miliar serta mendapat pinjaman komersial dari Bank Bumi Daya sebesar Rp190 miliar. Seharusnya sebagian dana itu diberikan kepada petani bantuan usahatani cengkeh. Namun yang terjadi bantuan itu tidak pernah sampai ke petani. Akumulasi persoalan tersebut, membuat petani kecewa dan tidak bergairah lagi, akibatnya banyak pohon cengkeh yang ditelantarkan begitu saja dan akhirnya mati. Fakta permasalahan yang ditimbulkan oleh BPPC, mengisyaratkan bahwa terdapat kelemahan pelaksanaan kelembagaan pemasaran cengkeh. Fenomena berbagai permasalahan dalam pengelolaan agribisnis cengkeh terjadi pula di Tidore Kepulauan.

Rukmana dan Yudirachman (2016), bahwa produktivitas cengkeh yang diperoleh petani tergolong rendah, karena petani hanya mampu memproduksi dibawah potensi sekitar 200 – 300 kg/hektar. Sedangkan tanaman cengkeh memiliki kemampuan berproduksi sekitar 500 – 600 kg/ha. Permasalahan berkurangnya luas areal tanaman cengkeh mempengaruhi tingkat pendapatan petani serta ketersediaan cengkeh di pasaran. Berdasarkan data BPS tahun

ahwa jumlah produksi pada tahun 2016 sebanyak 1.288 menurun 267 ton pada tahun 2017 . Sejalan dengan penelitian yang dilakukan





Yantu (2015), luas areal berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi cengkeh yang diperoleh petani. Selain itu ketidakstabilan harga jual cengkeh yang berlaku di pasaran merupakan permasalahan dalam pengembangan agribisnis cengkeh yang berkaitan dengan pendapatan petani. Berdasarkan data Dirjen Perkebunan tahun 2016 harga cengkeh mengalami fluktuasi yang tinggi dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Jumlah produksi yang cenderung menurun akibat menyempitnya luasan areal pertanaman cengkeh beberapa tahun terakhir serta perkembangan harga cengkeh selama 7 (tujuh) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

**Tabel 1.** Luas Areal, Jumlah Produksi dan Harga Cengkeh di Tidore Kepulauan Tahun 2010- 2018

Tahun	Luas areal (ha)	Jumlah Produksi (ton)	Harga (Rp)
2014	1.321	2.206	132.000
2015	1.122	1.343	121.500
2016	1.420	1.288	110.000
2017	1156	267	100.000
2018	1156	267	95.000

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Tabel 1 memperlihatkan kondisi luas areal, jumlah produksi dan tingkat harga dalam 5 (lima) tahun terakhir. Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa pada tahun 2016 jumlah produksi sebanyak 1.288 ton berkurang pada tahun 2017 menjadi 267 ton. Kondisi ini mengisyaratkan terjadinya penurunan jumlah

yang signifikan sebesar 1.021 ton. Berdasarkan data dari dinas pertanian kota Tidore, diketahui bahwa menurunnya jumlah produksi



disebabkan oleh terjadinya musim kemarau yang panjang pada akhir tahun 2016 yang menyebabkan banyaknya pohon cengkeh yang mengalami kekeringan dan mati. Pengaruh musim kemarau yang panjang mengakibatkan ketersediaan air dalam tanah berkurang. Lebih jelasnya jumlah pohon cengkeh yang mati dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

**Tabel 2.** Jumlah Pohon Cengkeh yang Mati Per Kecamatan Di Tidore Kepulauan, 2017

No	Kecamatan	Jumlah Pohon
1	Tidore Utara	17.013
2	Tidore Selatan	3.114
3	Tidore	3.840
4	Tidore Timur	11.151
5	Oba Selatan	8.869
6	Oba	14.390
7	Oba Tengah	9.452
8	Oba Utara	9.121
	Total	76.950 pohon

Sumber : Dinas Pertanian, 2017

Tabel 2 menunjukkan bahwa keseluruhan jumlah pohon yang mati di tahun 2017 sebanyak 76.950 pohon. Sedangkan jumlah pohon cengkeh yang mati terbanyak terdapat di Kecamatan Tidore Utara sebanyak 17.013 pohon. Berdasarkan data jumlah pohon cengkeh yang mati sekitar 76.950 pohon, untuk 1 (satu) pohon cengkeh mampu menghasilkan sebanyak 25 kg cengkeh kering berarti terjadi penurunan jumlah produksi mencapai 1.923.750 kg untuk

panen berikutnya. Berkurangnya jumlah produksi cengkeh juga terdapat di Kecamatan Oba Utara yang disebabkan oleh kurangnya akses jalan yang menghambat petani dalam membuka akses jalan tani yang memaksa untuk



dilakukannya kegiatan penebangan pohon cengkeh sepanjang jalan tersebut. Jumlah produksi dan harga jual cengkeh berpengaruh nyata terhadap keuntungan yang diperoleh petani cengkeh (Lolowang, et al., 2016). Siregar (2011); Yantu (2015); Lolowang *et al.* (2016); Rukmana dan Yudirachman (2016); Dirjen Perkebunan (2016); dan Sryangreini (2017), menegaskan bahwa rendahnya produktivitas cengkeh juga disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: 1). Menyempitnya luasan areal tanaman cengkeh dalam kurun waktu 15 tahun yakni pada tahun 1990 luasan areal 724.985 ha menurun pada tahun 2015 menjadi 535.694 ha 2). Terjadinya perubahan iklim dan cuaca 3). Kondisi kualitas tanah yang semakin menurun 4). Umur tanaman cengkeh 5). Kelembagaan petani yang belum optimal 6). Keterbatasan akses petani terhadap teknologi 7). Keterbatasan petani dalam permodalan dan pembiayaan usahatani cengkeh 8). Tidak terlaksananya dengan baik manajemen usahatani meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Berbagai permasalahan dalam kegiatan agribisnis cengkeh memerlukan adanya perhatian yang serius dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan dalam pengembangan agribisnis cengkeh untuk tujuan meningkatkan produksi tanaman cengkeh

perbaikan kelembagaan

perbaikan kelembagaan sebagai isu penting dalam Rencana Strategis

) Kementerian Pertanian 2014-2019. Pengembangan sektor pertanian



yang bersandar pada pengelolaan sumberdaya alam perlu regulasi dan kelembagaan untuk mensinergikan upaya yang saling mendukung dalam pencapaian sasaran tersebut. Menurut Beunen (2017), bahwa struktur kelembagaan dapat menghasilkan stabilitas dan fleksibilitas dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, regulasi dan kelembagaan mutlak diperlukan untuk menganalisis interaksi antara aktor sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pengembangan agribisnis cengkeh. Perbaikan kelembagaan dalam agribisnis cengkeh meliputi: kelembagaan agribisnis mulai dari hulu sampai hilir yang melibatkan kelembagaan petani, kelembagaan pemerintah dan kelembagaan pemasaran. Semua lembaga yang terlibat memiliki peranan dalam kegiatan agribisnis cengkeh di Tidore.

Kelembagaan harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan petani dalam mendukung kontinuitas usaha yang dilakukan. Namun realitasnya, keberadaan Kelembagaan petani tidak optimal dalam memberikan peranannya. Oleh karena pengelolaan usahatani seperti kegiatan pemasaran komoditas cengkeh belum bisa dijumpai secara baik oleh kelompok tani dan gaoktan yang terbentuk. Akibatnya kebutuhan petani terhadap sarana produksi pertanian tidak dapat terpenuhi dengan baik. Menurut Hasibuan *et. al.* (2012), Mayasari dan Nangameka (2013) dan Ikbal (2014), bahwa

kelompok tani berperan dalam pemenuhan kebutuhan sarana produksi serta meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petani dan keluarganya sebagai subjek pendekatan kelompok dalam pembangunan pertanian.



Kelompok tani diharapkan mampu membantu petani keluar dari persoalan kesenjangan ekonomi petani dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi usahatani, dan daya saing petani, namun sampai saat ini masih belum berfungsi secara optimal (Anantanyu, 2011). Dilain pihak gapoktan sebagai gabungan kelompok tani terkesan hanyalah sebagai alat, dan merupakan sebuah pilihan bukan keharusan. Gapoktan perlu membangun jejaring sosial dengan pihak lain, memperbanyak peran diluar aktivitas produksi atau usahatani. Pembentukan dan pengembangan Gapoktan harus menggunakan basis sosial capital setempat dengan prinsip otonomi daerah, pemberdayaan dan kemandirian lokal menuju pembangunan yang berkelanjutan (Pujiharto, 2010). Lebih lanjut Syahyuti (2007) menegaskan, bahwa Gapoktan menjadi lembaga gerbang (*gateway institution*) yang menjadi penghubung petani satu desa dengan lembaga-lembaga lain di luarnya. Gapoktan diharapkan berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk pertanian, dan menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani.

Menurut Anantanyu (2011), bahwa Keberadaan petani tanpa difasilitasi oleh kelompok tani akan mengakibatkan ketidakberdayaan posisi tawar petani dalam menentukan harga jual cengkeh, sementara menurut Herdt (2012),

*et al.*, (2010) dan Pondaag (2015), bahwa kelembagaan kelompok tani sangat penting dalam peningkatan produktivitas kerja anggota dalam



upaya membangun kerjasama dengan pihak lain untuk menjaga pasokan cengkeh tetap stabil dan harga jual cengkeh tidak berfluktuasi secara tajam.

Kegiatan agribisnis cengkeh tidak terlepas dari keterlibatan kelembagaan pemerintah dalam menciptakan suasana yang mendukung pengembangan produksi dan peningkatan pendapatan petani. Kelembagaan pemerintah merupakan wadah dimana pelaku-pelaku ekonomi dan komunitas petani berinteraksi dalam akses dan distribusi manfaat terhadap sumber-sumber daya yang tersedia. Kelembagaan pemerintah diharapkan mampu berperan baik sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator (Nurdin *et al.*, 2014). Dalam perannya sebagai pelayan, maka pemerintah harus melayani pelaku bisnis maupun yang lainnya. Eksistensi layanan pemerintah perlu ditingkatkan seperti penyediaan bibit unggul, ketersediaan pupuk, dan lembaga pemasaran yang berpihak pada petani (Saida *et al.*, 2011).

Kelembagaan pemerintah sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan dalam bentuk regulasi dan kebijakan memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan pasokan cengkeh mulai dari para petani, pedagang pengumpul sampai di perusahaan. Kurang efektifnya kelembagaan pemerintah dalam menjalankan peran sebagai pembuat kebijakan dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait menyebabkan kurang efektifnya

aan sumberdaya (Juniati dan Imam, 2016). Dengan demikian

aan sumberdaya harus melibatkan semua pihak yang terkait demi



keberlanjutan pembangunan pertanian. Kebijakan pembangunan pertanian yang dilakukan oleh lembaga pemerintah cenderung terlepas dari pembangunan sektor lain, kebijakan dibidang pertanian tidak selalu diikuti oleh kebijakan pendukung lain secara sinergis (Zakaria, 2009).

Kebijakan yang ditempuh saat ini masih bersifat umum, tidak khusus untuk cengkeh saja. Kebijakan yang bersifat spesifik hanya kebijakan untuk penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan secara khusus oleh Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Litbang Pertanian, 2007), oleh karenanya dibutuhkan kebijakan secara menyeluruh dalam pengembangan agribisnis cengkeh.

Kegiatan agribisnis cengkeh juga melibatkan pelaku usaha dalam aspek pemasaran. Kelembagaan pemasaran yang meliputi pedagang sangat berperan dalam kegiatan pembelian sarana produksi dan hasil panen cengkeh dari petani. Kegiatan pembelian sarana produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan dan alat-alat pertanian melibatkan para pedagang pemilik toko-toko yang menyediakan sarana produksi pertanian. Sedangkan kegiatan penjualan hasil panen cengkeh melibatkan pedagang pengumpul hasil pertanian. Menurut Syafriyatin *et.al.*, 2013 dan Abubakar *et al.*, 2013, bahwa hubungan antara petani dengan Toke (pedagang) dipengaruhi oleh faktor

perekonomian dimana petani menempati posisi tawar menawar yang lemah dalam transaksi dengan pedagang sehingga adanya hubungan yang baik dapat menyebabkan kerugian bagi petani.



Kondisi kelembagaan agribisnis cengkeh yang belum mampu menyelesaikan beberapa permasalahan pengembangan produksi cengkeh memerlukan adanya suatu kajian yang bertujuan untuk melihat interkonektivitas diantara kelembagaan yang ada dalam mewujudkan keberlanjutan agribisnis cengkeh. Hubungan kelembagaan pemerintah, petani dan pedagang yang kompleks harus dianalisis dengan pendekatan holistik, bukan direduksi menjadi pendekatan bagian (partial). Karena kinerja sistem tidak bisa ditentukan hanya oleh satu atau dua bagian saja. Pendekatan holistik dapat dilakukan dengan memahami pola hubungan antar sistem yang ada. Istilah pola merujuk pada perilaku hubungan sistem yang berulang-ulang. Pola hubungan ini dinyatakan oleh Mappadjantji (2002) dan Salman (2012) sebagai interkoneksi, yang maknanya saling keterhubungan atau saling memberikan akses.

Isu penting yang menjadi kelemahan dalam rencana strategi pembangunan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tidore Kepulauan tahun 2016-2021 adalah masih lemahnya koordinasi lintas sektor. Sementara Gurvich, (2016); Gustafsson dan Rolf, (2017) menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor yang lemah merupakan akibat dari kerangka kelembagaan yang kaku sehingga menghambat

...angan ekonomi suatu wilayah dan organisasi atau lembaga  
...kan jalan untuk memfasilitasi interaksi. Menurut Zulham, (2013) dan  
...et al., (2015), bahwa meskipun terdapat perbedaan langsung antara





institusi publik, swasta dan masyarakat dalam hal fungsinya, namun interkoneksi sangat diperlukan agar partisipasi pemangku kepentingan setiap lembaga dapat meningkatkan saling keterhubungan atau saling memberikan akses antara lembaga yang satu dengan yang lainnya untuk mengembangkan kelembagaan, sedangkan yang terjadi di Kota Tidore Kepulauan antara lembaga tidak saling memberikan akses dalam pengelolaan cengkeh. Dibalik hubungan saling pengaruh antara pemerintah dan pelaku usaha terdapat perbedaan yang mendasar serta kekuatan dan kelemahan tersendiri. Kelebihan pemerintah adalah jaringan yang luas dan struktur yang stabil, namun tidak efisien serta tidak berjiwa bisnis. Sementara kelemahan bagi pelaku usaha yang mendasar adalah jaringan yang bersifat parsial dan segmentatif. Pada saat yang bersamaan, peran kelembagaan petani semakin terpinggirkan, karena semakin lemahnya keberadaan dan kekuatan kelembagaan ditengah masyarakat.

Kelembagaan petani yang memiliki hubungan kuat dengan kelembagaan pemasaran memiliki dampak positif pada kemampuan untuk menjual produk yang dihasilkan (Corsi *et al.*, 2017). Aktivitas pedagang berlandaskan pada moral mencari keuntungan, sementara petani sebagai produsen atau penghasil cengkeh berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan untuk  
atan hidup. Dilain pihak pemerintah sebagai lembaga pelayanan demi  
nya tata kelola pemerintahan yang baik.



Penelitian dengan tema kelembagaan dan usaha tani cengkeh sudah pernah dilakukan terutama dari sudut pandang produktivitas, pemasaran dan kelayakan finansialnya, namun penelitian tersebut umumnya masih bersifat parsial. Prawiranegara, et.al., 2017, meneliti tentang Penguatan Peran Kelembagaan Petani Dalam Peningkatan Kapabilitas Petani Mengelola Inovasi Berbasis Teknologi Informasi, Darmansyah, Ramlan dan Raja Muhammad Amin (2019) tentang Kearifan Lokal Desa Buluh Cina (Studi Kasus Koordinasi Lembaga Adat, Pemerintahan Desa Dan BBKSDA Riau Dalam Melindungi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina). Towaha (2012) meneliti tentang pemanfaatan cengkeh dibidang industri seperti industri farmasi, kosmetika, makanan, minuman, rokok, pestisida nabati, perikanan, pertambangan, kemasan aktif dan industri kimia lainnya. Tjonger's, (2010) meneliti pemanfaatan cengkeh dalam pemenuhan permintaan untuk kebutuhan pasar nasional dan internasional. Menurut Putra 2014; Siregar 2011 dan Yantu 2015, bahwa permasalahan yang dihadapi oleh petani cengkeh meliputi :tanaman mati muda, hama binatang, pemahaman petani dalam pemupukan, petani menjual buah sebelum panen dan kematangan buah tidak merata serta adanya ketidakstabilan harga jual cengkeh, sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap produksi

adalah luas lahan, jumlah tanaman, pupuk, tenaga kerja dan



Sucihatiningih, DWP dan Waridin (2010) meneliti tentang model penguatan kelembagaan penyuluh pertanian dalam meningkatkan kinerja usahatani melalui transaction cost. Rumanggit *et al.*, (2007) meneliti tentang keterkaitan antara petani cengkeh dan industri rokok kretek untuk keberlanjutan usaha tani cengkeh dan industri rokok kretek. Sedangkan Gusmawati *et al.*, (2014) meneliti waktu pengembalian investasi dalam usaha tani cengkeh memiliki masa 3 tahun 4 bulan. Siregar, (2011) meneliti tentang perbedaan harga cukup tinggi pada sistem distribusi cengkeh sejak dari petani hingga ke pedagang pengumpul. Fuad (2015); Dolo *et al.*, (2015); Lolowang *et al.*, (2016); Astuti (2016), meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani cengkeh, Penelitian keberlanjutan usaha tani hanya memperlihatkan realitas kehidupan petani cengkeh sebagai profesi yang harus dijalani dengan berbagai alasan dan berbagai macam resiko (Hariyani, 2016), belum ada yang melihat dari sudut pandang keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan. Beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa penelitian yang mengkaji tentang interkoneksi keseluruhan kelembagaan yang terlibat mulai dari kelembagaan petani, pemerintah dan pelaku usaha secara komprehensif dalam pengelolaan agribisnis cengkeh sebagai upaya mendukung keberlanjutan agribisnis

belum pernah dilakukan. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi k antara petani, pemerintah, pelaku usaha dalam menciptakan kondisi menguntungkan. Keterkaitan kelembagaan agribisnis cengkeh



merupakan fenomena permasalahan yang menarik untuk dikaji satu rangkaian sistem agribisnis untuk mencapai keberlanjutan.

## B. Rumusan Masalah

Kegiatan agribisnis cengkeh menghadapi berbagai permasalahan disetiap subsistem, baik subsistem penyediaan input , subsistem usahatani, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran dan subsistem pendukung. Rendahnya akses petani terhadap sarana produksi, daya tawar petani yang rendah akibat kurangnya pengetahuan petani tentang informasi pasar ((Narloh, 2017). Penyuluh pertanian yang tidak banyak berperan dalam usahatani cengkeh dan kurang membantu dalam memberikan informasi pasar tentang harga cengkeh (Programa BPP, 2018). Permasalahan yang ada mengindikasikan bahwa dalam mewujudkan keberhasilan agribisnis cengkeh tidak lepas dari peran setiap kelembagaan yang terlibat dan partisipasi semua stakeholder yang berpengaruh dalam agribisnis cengkeh. Dengan demikian pemahaman tentang peranan kelembagaan dan keberadaan stakeholder diperlukan untuk memahami interkoneksi yang terjadi antara masing-masing kelembagaan. Dari uraian tersebut memunculkan rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan kelembagaan agribisnis cengkeh di Tidore

Kepulauan?



2. Bagaimana interkoneksi kelembagaan agribisnis cengkeh di Tidore Kepulauan?
3. Bagaimana keberlanjutan agribisnis cengkeh di Tidore Kepulauan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis peranan kelembagaan dalam pengelolaan agribisnis cengkeh di Tidore Kepulauan.
2. Menganalisis interkoneksi kelembagaan agribisnis cengkeh di Tidore Kepulauan.
3. Menganalisis keberlanjutan agribisnis cengkeh di Tidore Kepulauan

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian kiranya dapat menghasilkan bentuk interkoneksi kelembagaan dalam mendukung keberlanjutan agribisnis cengkeh.
2. Bagi para pengambil kebijakan dibidang pembangunan pertanian, diharapkan hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan tentang konektivitas kelembagaan dalam pengelolaan cengkeh dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dalam pengelolaan cengkeh secara berkelanjutan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Interkoneksi Kelembagaan

Interkoneksi mengacu pada pandangan sistem sains baru beranggapan bahwa entitas adalah perwujudan dari interkoneksi. Sains baru mengedepankan pandangan holisme sebagai lawan dari bagian (parsial) yang menjadi pandangan sains modern. Holisme memandang entitas sebagai sistem yang kait-mengkait antara satu dengan lainnya. Menurut Ermaya, (1994 dalam Nazuka, 2005) bahwa pengertian sistem adalah keseluruhan yang mencakup bagian-bagian yang mempunyai hubungan, baik langsung maupun tidak langsung satu dengan yang lainnya yang merupakan totalitas. Tujuan yang memotivasi sistem tidak akan pernah tercapai oleh satu atau beberapa bagian saja, tetapi harus dengan kinerja dari segenap bagian yang menyusunnya. Setiap bagian dari sistem harus terinterkoneksi, agar memperoleh sirkulasi informasi, energi, dan materi dari bagian-bagian lain dalam sistem itu. Jika tidak, maka kapasitas sistem menurun, kolaps, dan bahkan punah, sehingga tidak bisa hidup berkelanjutan. Untuk menghindari terjadinya kemunduran dalam system, maka diperlukan adanya interkoneksi dari entitas sistem yang diinginkan keberlanjutannya.



Interkoneksi dapat diartikan sebagai akses keterhubungan yang merupakan konsep pendekatan paham holistik yang terwujud dalam berbagai entitas dan fenomena alam maupun sosial yang memiliki karakteristik serupa. Konsep Interkoneksi adalah saling keterhubungan antara dua atau lebih elemen seperti penduduk, sumberdaya alam dan kelembagaan dalam konteks wilayah. Pembangunan bukan karena keterbelakangan, tetapi ketiadaan akses atau keterhubungan. (Mappadjantji, (2002) dan Salman, (2012))

Konsekuensi logis dari adanya akses, maka setiap entitas akan berarti saling berinteraksi, saling terkait, saling membutuhkan, saling bertukar informasi energi materi. saling menyesuaikan diri (adaptif), baik terhadap komponen-komponen yang berada didalam sistem alam, maupun komponen-komponen yang berada dalam sistem sosial. Interkoneksi sebagai suatu sistem keterhubungan antara beberapa subsistem mendorong kemampuan adaptasi terhadap setiap perubahan. Dengan demikian sistem dapat berlangsung lebih lama (berkelanjutan) karena terhindar dari seleksi alam dan kepunahan. Wujud entitas bisa dalam bentuk nyata seperti pengelolaan agribisnis cengkeh, individu, komunitas petani cengkeh, atau masyarakat. Sedangkan wujud abstraknya bisa dalam bentuk konsep, pemikiran, disiplin teknik dan manajerial (Nikoyan, 2014).



Paradigma interkoneksi memahami kompleksitas fenomena dari kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia serta kerjasama dan membutuhkan dapat memecahkan persoalan yang dihadapi oleh manusia (Abdullah, 2013). Interkoneksi kelembagaan merupakan keterkaitan beberapa faktor institusi bagi peningkatan pembangunan (Jacobi, 2017)

Pendekatan dalam analisis sistem perlu diletakkan pada pola hubungan, bukan hanya menganalisis bagian-bagiannya (pola obyek) (Mappadjantji, (2006); Salman, (2012); Boardman dan Brian, (2013)). Pada ilmu pengetahuan sains-modern mengajarkan bahwa segala sesuatu harus diukur dan ditimbang. Namun, hubungan tidak dapat diukur dan ditimbang, hubungan perlu dipetakan. Bilamana anda memetakan hubungan, akan menemukan konfigurasi hubungan tertentu secara berulang yang disebut pola sebagai konfigurasi hubungan yang muncul berkali-kali.

Kontribusi entitas atau komponen lain yang ada pada lingkungan diartikan sebagai jaringan kerja (Amin, 2006). Jaringan kerja yang dibangun harus menganut prinsip interkoneksi, bukan hanya peneliti dan penyuluh. Namun, mencakup juga satuan kerja lingkup pemerintah daerah, dunia usaha, maupun lembaga swadaya masyarakat (Zulham, 2013). Analisis jaringan mempelajari keteraturan individu atau kolektivitas berperilaku dan yang

sasaran utama perhatian teori jaringan dalam mempelajari struktur adalah menganalisis pola ikatan yang menghubungkan anggotanya,





yang aktornya bukan saja individu, melainkan kelompok, perusahaan dan masyarakat (Ritzer dan Goodman, 2012) .

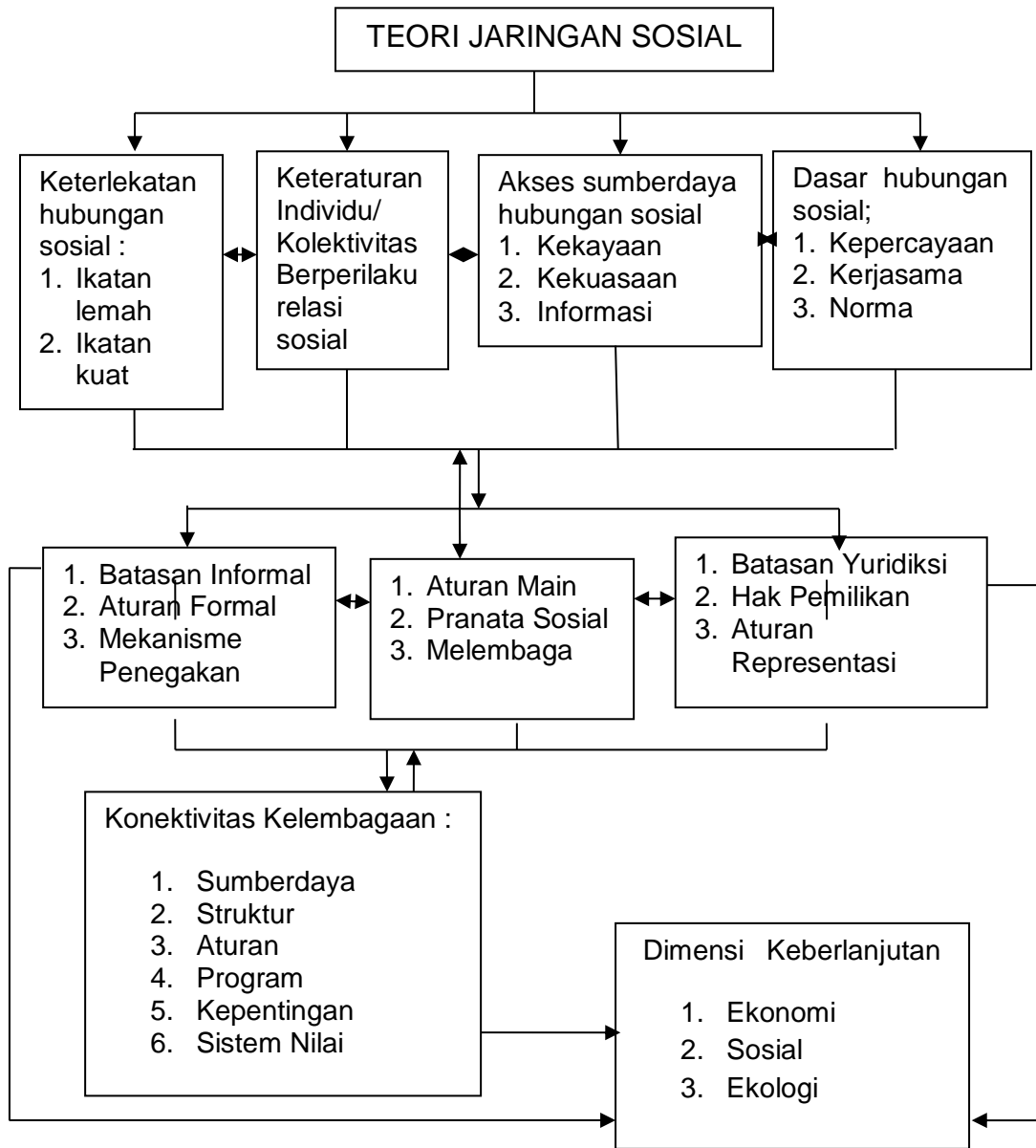
Teori jaringan (*network theory*) melihat manusia memiliki jejaring interaksi karena adanya kesamaan norma dan nilai, serta proses sosialisasi dari stuktur sosial. Teori ini berfokus kepada kebudayaan dan sosialisasi yang membentuk norma dan nilai dalam satu kelompok sosial dan pada tahap selanjutnya setiap individu yang menjadi anggotanya terinternalisasi oleh norma dan nilai tersebut. Selain itu digunakan teori jejaring menurut J.A Barnes, (1954), bahwa Jejaring sosial merupakan sebuah sistem struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individu atau organisasi. Jejaring sosial ini akan membuat mereka yang memiliki kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang telah dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga bisa saling berhubungan.

Jejaring sosial melihat setiap interaksi yang dilakukan di dalam suatu kelompok sosial pada akhirnya akan membentuk suatu keseimbangan struktur sosial dengan membentuk suatu identitas bersama pada suatu kelompok sosial. Terjadinya suatu interaksi dipengaruhi oleh kuat dan lemahnya suatu relasi sosial antar individu dengan individu lainnya. Interaksi lebih sering dilakukan oleh seseorang dengan orang lain karena adanya kesamaan nilai dan norma dibandingkan dengan individu yang berbeda nilai

ma. Dengan teori jaringan sosial sebagai landasan utama, maka



penelitian ini menganalisis jejaring pola hubungan kelembagaan agribisnis cengkeh dapat dilihat pada gambar 4 berikut:



4. Kerangka Konseptual Jaringan Sosial



Konsep jaringan menurut Lawang (2004) merupakan terjemahan dari *network*, yang berasal dari suku kata yaitu *net* dan *work*. *Net* diterjemahkan dalam bahasa sebagai jaring yaitu tenunan seperti jala, terdiri dari banyak ikatan antar simpul yang saling terhubung antara satu sama lain. Sedangkan kata *work* bermakna sebagai kerja. Gabungan kata *net* dan *work* sehingga menjadi *network*, yang penekanannya terletak pada kerja bukan pada jaring, dimengerti sebagai kerja (bekerja) dalam hubungan antar simpul-simpul seperti halnya jaringan. Berdasarkan cara seperti itu, maka jaringan dimengerti sebagai:

1. Ada ikatan antar simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial). Hubungan sosial ini diikat dengan kepercayaan. Kepercayaan itu dipertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak.
2. Ada kerja antar simpul (orang atau kelompok) yang melalui media hubungan sosial menjadi satu kerjasama, bukan kerja sama-sama.
3. Dalam kerja jaring itu ada ikatan (simpul) yang tidak dapat berdiri sendiri. Semua simpul menjadi satu kesatuan dan ikatan yang kuat.
4. Ikatan atau pengikat (simpul) adalah norma yang mengatur dan menjaga bagaimana ikatan dan mediana itu dipelihara dan pertahankan.



Konsep jaringan mencakup unsur kerja yang melalui media hubungan sosial menjadi kerja sama. Pada dasarnya jaringan sosial terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan dan saling membantu dalam melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu. Intinya, konsep jaringan dalam kapital sosial menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Menurut Damsar dan Indriyani, (2013) menyatakan bahwa tingkatan dalam jaringan meliputi:

1. Tingkatan mikro merupakan bentuk jaringan antar pribadi (individu) dalam kehidupan. Jaringan mikro memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu:
  - 1). Sebagai pelicin, jaringan akan memberikan berbagai kemudahan untuk mengakses bermacam barang dan sumberdaya langka seperti informasi, kekuasaan dan lain-lain.
  - 2). Sebagai jembatan, jaringan dapat memudahkan hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya.
  - 3). Sebagai perekat, jaringan memberikan tatanan dan makna pada kehidupan sosial.
2. Tingkatan meso yaitu bentuk hubungan yang dibangun oleh para aktor dan atau didalam kelompok sehingga terbentuk suatu ikatan. Jaringan meso dapat ditemui dalam berbagai kelompok seperti: ikatan alumni, paguyuban dan ikatan profesi (Ikatan Dokter). Seperti



halnya jaringan mikro, pada jaringan meso juga memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu sebagai pelicin, sebagai jembatan dan sebagai perekat.

3. Tingkatan makro merupakan ikatan yang terbentuk karena terjalannya simpul-simpul dari beberapa kelompok. Jaringan makro terajut dari dua kelompok atau lebih. Kelompok bisa dalam bentuk organisasi, institusi dan negara. Pada tataran makro, jaringan lebih berfungsi sebagai jembatan yang memberikan fasilitas atau saluran bagi terjalannya komunikasi antar kelompok yang terlibat.

Hubungan dapat terjadi ditingkat struktur sosial skala luas maupun ditingkat yang lebih mikroskopik. Hubungan ini berlandaskan bahwa setiap aktor (individu atau kolektivitas) mempunyai akses berbeda terhadap sumberdaya yang bernilai (kekayaan, kekuasaan dan informasi). Akibatnya bahwa sistem yang terstruktur cenderung terstratifikasi, komponen tertentu tergantung kepada komponen yang lain (Ritzer dan Goodman, 2012).

Granoveter (2005) melukiskan pula bahwa hubungan ditingkat mikro itu seperti tindakan yang melekat dalam hubungan pribadi konkret dan dalam struktur (jaringan) hubungan tersebut. Keterlekatan sosial berlangsung pada realitas relasi sosial antar aktor ekonomi. Keterlekatan sosial terkandung

relasi inter-personal aktor ekonomi dan jaringan sosial. Pandangan Granoveter menempatkan keterlekatan sosial dalam konteks relasi sosial yang sedang berjalan. Jenis jaringan sosial yang terbentuk dalam



masyarakat yaitu 1). Jaringan sosial interest (kepentingan) adalah hubungan sosial yang memiliki kepentingan. 2). Jaringan sosial kekuasaan (power) adalah hubungan-hubungan sosial yang membentuk jaringan bermuatan kekuasaan. Power merupakan kemampuan seseorang atau unit sosial untuk mempengaruhi perilaku dan pengambil keputusan orang atau unit sosial lainnya melalui pengendalian. 3). Jaringan sosial sentiment (emosi) adalah hubungan sosial yang terbentuk karena adanya muatan emosi, misalnya; percintaan, pertemanan atau hubungan kerabat.

Suatu ikatan apapun bentuknya lemah atau kuat akan memberikan kemudahan dalam kehidupan. Suatu ikatan jaringan yang kuat memberikan basis motivasi yang lebih besar untuk saling memberikan bantuan. Ikatan kuat dicirikan sebagai waktu dan emosi intensif dengan keintiman. Sedangkan ikatan lemah ditandai dengan waktu dan emosi yang kurang intensif. Ikatan yang lemah berperan dalam membantu menjembatani antara dua kelompok yang kuat ikatan internalnya. (Ritzer dan Goodman, 2012).

Teori jaringan bersandar pada 6 (enam) prinsip yang berkaitan logis meliputi : 1). Ikatan antara aktor biasanya adalah simetris (sama bagiannya) baik dalam kadar maupun intensitasnya 2). Ikatan antara individu harus terstruktur dalam konteks struktur jaringan yang lebih luas 3). Terstrukturnya jaringan sosial menimbulkan berbagai jenis jaringan yang teratur 4). Adanya jaringan menyebabkan terciptanya hubungan silang antara



kelompok jaringan maupun antara individu 5). Ada ikatan asimetris antara unsur-unsur didalam sebuah sistem jaringan dengan akibat bahwa sumberdaya yang terbatas akan terdistribusikan secara tidak merata 6). Distribusi yang timpang dari sumberdaya yang terbatas menimbulkan baik itu kerjasama maupun kompetisi. Dengan demikian teori jaringan berkualitas dinamis dengan struktur sistem akan berubah bersamaan dengan terjadinya pergeseran pola koalisi dan konflik (Wirawan, 2012).

Istilah kelembagaan mencakup beberapa elemen di antaranya adalah sistem keteraturan (sering dikenal juga sebagai pranata) atau tata nilai, kompetensi sumberdaya manusia, organisasi, manajemen, kepemimpinan, hukum dan sistem penyelenggaraan pemerintahan (Mubyarto, 2002)

Kelembagaan adalah perilaku terpola yang bersifat relative permanen dari sejumlah individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perilaku terpola berlangsung berdasarkan norma atau aturan main (*role of the game*) yang dipatuhi bersama dalam masyarakat dan memiliki sanksi serta merupakan cara-cara yang standar untuk memecahkan masalah. Sedangkan kelembagaan pembangunan adalah kompleks aturan (nilai, simbol, norma, prosedur) dan organisasi (struktur dan status., fungsi dan peran) yang

garuhi perilaku (tata kelakuan/perilaku terpola) untuk mengarahkan, cepat dan memelihara perubahan bagi tercapainya tujuan bersama yang dianggap bernilai pada sebuah tatanan (Salman, 2015).



Kelembagaan merupakan sekumpulan batasan atau faktor pengendali yang mengatur hubungan perilaku antar anggota atau antar kelompok serta mencakup penataan institusi (*institutional arrangement*) untuk memadukan organisasi dan institusi. Penataan institusi adalah suatu penataan hubungan antara unit-unit ekonomi yang mengatur cara unit-unit ini apakah dapat bekerjasama dan atau berkompetisi. Dengan demikian norma/kaidah peraturan akan memudahkan koordinasi dalam membentuk harapan masing-masing yang mungkin dapat dicapai dengan saling bekerjasama (Cornelius *et al.*, 2005)

Kelembagaan juga dimaknai sebagai regulasi perilaku yang secara umum diterima oleh anggota-anggota kelompok sosial untuk perilaku spesifik dalam situasi yang khusus baik yang diawasi sendiri maupun dimonitor oleh otoritas dari luar (Rutherford, 1994). Dengan demikian kelembagaan membentuk pilihan (preferensi) dan nilai-nilai dari individu yang dibesarkan dalam suatu lingkungan tertentu.

Tiga aspek pokok dalam kelembagaan yaitu: 1). Aturan main (role of the game) yang berasal dari norma sosial. Dalam studi pembangunan dipahami sebagai hasil konstruksi sosial atau rekayasa sosial 2). Pranata sosial (struktur atau tanpa struktur), dimana pranata fungsional terhadap struktur. Syarbaini

sdiyanta (2009) dan Suwartapradja (2010) bahwa pranata sosial dan seperangkat norma yang saling berkaitan mengandung





kepentingan sosial, ekonomi dan budaya yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. 3). Memiliki sifat melembaga (*institutionalized*), mengakar dan tertanam dalam masyarakat. Kompleksitas pertanian sebagian muncul dari berbagai unit dan lembaga yang terlibat dan dari kesulitan-kesulitan dalam mencapai kecocokan yang baik di antara lembaga.

Ketiga komponen dalam kelembagaan meliputi: 1). Batasan-batasan informal (informal constraint) yang meliputi: pengalaman, nilai - nilai tradisional, agama dan seluruh faktor yang mempengaruhi bentuk persepsi subyektif individu tentang dunia dimana mereka hidup 2). Aturan-aturan formal (formal rules) meliputi konstitusi, statuta, hukum, dan seluruh regulasi pemerintah. Aturan formal membentuk sistem politik (struktur pemerintahan, hak-hak individu), sistem ekonomi (hak kepemilikan dalam keadaan kelangkaan sumberdaya, kontrak) dan system keamanan (peradilan, polisi). 3). Mekanisme penegakan (*enforchment mechanism*) bahwa semua kelembagaan tersebut tidak akan efektif apabila tidak diiringi dengan mekanisme penegakan (Rintuh dan Miar, 2005),

Kelembagaan berisikan dua aspek penting yaitu; aspek kelembagaan dan aspek keorganisasian. Aspek kelembagaan meliputi perilaku atau perilaku

mana inti kajiannya adalah tentang nilai (*values*), norma (norm), adat, istiadat (*mores*), Kebiasaan (folkways), cara (*usage*), kepercayaan, ide, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan dan orientasi. Bentuk



perubahan sosial dalam aspek kelembagaan bersifat kultural dan proses perubahannya membutuhkan waktu yang lama. Sementara dalam aspek keorganisasian meliputi struktur atau struktur sosial dengan inti kajiannya terletak pada aspek peran (*role*), aktivitas, hubungan antar peran, integrasi sosial, struktur umum, perbandingan struktur tekstural dengan struktur faktual, struktur kewenangan atau kekuasaan, hubungan antar kegiatan dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek solidaritas, klik, profil dan pola kekuasaan. Bentuk perubahan sosial dalam aspek keorganisasian bersifat struktural dan berlangsung relative cepat (North, 1990).

Pengertian nilai adalah sebagai komoditas utama yang didistribusikan oleh struktur-struktur dalam setiap sistem yang meliputi keterampilan, pendidikan, kekuasaan, keadilan. Norma adalah peraturan, baik tertulis maupun tidak yang mengatur tata hubungan antar aktor dalam suatu sistem. Cara menunjukkan suatu perbuatan yang bentuk penyimpangannya tidak dihukum dengan berat, akan tetapi hanya sekedar celaan. Adat istiadat adalah suatu kelakuan yang kekal dan kuat integrasinya dengan pola-pola perikelakuan masyarakat. Anggota yang melanggar dapat dikenakan sanksi yang berat. Kepercayaan adalah wilayah psikologis yang merupakan perhatian untuk menerima apa adanya berdasarkan harapan terhadap perilaku yang baik

ng lain (Anggara, 2013). .



Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, mempunyai kekuatan mengikat dari cara (*usage*) yang merupakan sebagai bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan itu. Tata kelakuan merujuk pada kebiasaan yang diterima sebagai norma-norma pengatur. Tata kelakuan dapat memberi batas pada kelakuan individu, mengidentifikasi individu dengan kelompoknya dan dapat menjaga solidaritas antara anggota masyarakat (Syarbaini dan Fatkhuri, 2016). Kelembagaan merupakan pola tatanan hubungan antara masyarakat yang saling mengikat berupa norma, budaya, kode etik aturan formal maupun informal untuk mengendalikan tingkah laku manusia dalam mencapai tujuan bersama dalam kehidupan (Aoki (2002), Cornelius dan Miar (2005), Scott (2008), Salman (2015), Mannetti et.al., (2017), sementara menurut Berger dan Luckman (1994), Nehring (2015) dan Loe (2015), bahwa kelembagaan sebagai produk interaksi sosial yang menekankan penciptaan pengetahuan bersama dalam menangani kemiskinan pedesaan dan lingkungan hidup.

Kelembagaan juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut :1). Batas yuridiksi. Batas yuridiksi menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam organisasi. Batas yuridiksi yang dimaksud yaitu batas wilayah kerja, batas skala usaha yang diperbolehkan dan jenis usaha yang diperkenankan. 2). Hak pemilikan

(rights) merupakan aturan (hukum, adat dan tradisi) yang mengatur hubungan antar anggota organisasi dalam hal kepentingannya terhadap wilayah, situasi atau kondisi. Tidak ada seorangpun yang dapat



menyatakan hak milik tanpa pengesahan dari masyarakat dimana dia berada. Hak pemilikan juga merupakan sumber kekuatan untuk akses dan kontrol terhadap sumberdaya. Hak tersebut dapat diperoleh melalui pembelian, pemberian atau hadiah atau pemberian administrasi pemerintah seperti subsidi 3). Aturan representasi merupakan perangkat aturan yang mengatur mekanisme pengambilan keputusan organisasi (Pakpahan,1991).

Lembaga-lembaga menyusun batasan-batasan manusiawi dalam struktur politik, ekonomi dan interaksi sosial. Mereka terdiri dari kedua kendala informal (sanksi, tabu, adat istiadat, tradisi, kode perilaku), dan formal peraturan (undang-undang dasar, undang-undang, hak kepemilikan). Lembaga (*institution*) adalah sekelompok praktik yang mendefinisikan perilaku kelompok dan memiliki makna yang memberinya legitimasi ( Cunha, 2017). Lembaga juga mencakup aturan atau prosedur yang membentuk peran atau organisasi yang telah mencapai status atau legitimasi khusus (Brinkerhoff dan Goldsmith, 1990).

Sementara itu Faria *et al.*, (2016), Assiamah *et al.*, (2017) dan Mubay (2017), menambahkan bahwa institusi juga berfungsi sebagai katalisator untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam yang dapat mendorong tindakan dalam menghadapi kecenderungan di masyarakat dalam kegiatan gunan, sementara menurut Voss, (2015), bahwa institusi menekankan peraturan dan stabilitas dalam interaksi manusia.



Brinkerhoff dan Goldsmith (1990) dan Yustika (2012) bahwa perkembangan kelembagaan merupakan kemampuan sebuah lembaga merespon kreatif dinamika lingkungan strategis dalam lingkungan strategisnya yang dapat mengurangi ketidakpastian yang inheren dalam interaksi manusia melalui penciptaan pola perilaku, sementara menurut Taylor dan Van (2015), bahwa partisipasi petani dalam program lingkungan nasional dimediasi oleh institusi lokal dan impor. Selain itu lembaga menyangga aspek skema budaya dan politik yang tidak ramah dan meningkatkan keuntungan finansial dan budaya petani.

Keterkaitan sektor kelembagaan dalam kegiatan pembangunan diklasifikasikan dalam tiga yang meliputi: Pertama, lembaga lokal yang termasuk dalam sektor publik (publik sektor), terdiri dari administrasi lokal adalah lembaga pemerintahan (lembaga birokrasi) dan pemerintahan lokal adalah lembaga politik berupa badan yang dipilih atau diangkat. Kedua, lembaga lokal yang termasuk dalam sektor sukarela (*voluntary sector*) adalah lembaga yang dibentuk untuk kepentingan bersama terdiri atas organisasi keanggotaan dan koperasi. Ketiga, lembaga lokal yang termasuk dalam sektor swasta (*private sector*) adalah lembaga yang sebagian berupa pengusaha swasta yang cenderung mencari keuntungan bisnis (*profit motive*) dan

dan lain penjual pelayanan social yang cenderung tidak mencari keuntungan (*non profit motive*), terdiri atas organisasi jasa dan bisnis swasta (1986). Kelembagaan lokal tersebut mengelola bidang-bidang



pembangunan lokal yang terdiri dari: sumberdaya alam, sumberdaya manusia, infrastruktur, pertanian dan non pertanian (Friel, 2017) .

Kegagalan dalam pengembangan kelembagaan merupakan gambaran tidak berfungsinya institusi seperti kebijakan, pasar, kemampuan sumber keuangan, interaksi dan kolaborasi yang tidak efektif antara pemangku kepentingan yang merupakan mesin pembangunan ekonomi pedesaan. Oleh karena itu, penanganan kebijakan dan program pembangunan pertanian memerlukan konektivitas antara semua lembaga, tidak seperti selama ini secara parsial bukan hanya tidak efektif dan tidak efisien, tetapi juga pemangku kepentingan (stakeholder) diluar pemerintah kebingungan (Schut, 2016). Sementara Gilles et al., (2015) dan Vianna, et al., (2018) menyatakan bahwa peraturan kelembagaan dalam mengatur interaksi ekonomi bertujuan untuk mencapai efisiensi kebijakan moneter dalam mewujudkan kestabilan ekonomi. Ego sektoral masih kental mewarnai dan mengakibatkan persoalan-persoalan riil tidak pernah terselesaikan secara tuntas. Penyelesaian secara parsial kadang-kadang bisa diwujudkan, akan tetapi pertanian sebagai suatu sistem memerlukan pemecahan secara menyeluruh dan komprehensif (Nuhung, 2012).

pengembangan sistem kelembagaan agribisnis cengkeh diharapkan mendukung berlangsungnya mekanisme penyediaan modal, dan barang-barang input, penanganan pasca panen dan pemasaran



dapat berlangsung secara optimal. Kelembagaan pemerintah yang meliputi lembaga pemerintah pusat dan daerah seperti Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi harus berada dalam satu atap koordinasi, oleh karena pengembangan dibidang pertanian merupakan suatu sistem yang saling terkait mulai dari hulu sampai ke hilir. Lembaga pemerintah berfungsi memproduksi kebijakan pertanian dalam bentuk undang-undang, peraturan dan program yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani cengkeh. Menurut Alam *et al.*, (2016); Niesten *et al.*, (2017); Wu (2017); Carvalho *et.al.*, (2017) dan Ruiz (2018) bahwa fungsi pemerintah dalam hal ini pemerintah tingkat kabupaten/kota adalah mengatur perumusan undang-undang dan implementasi kebijakan peraturan lingkungan memiliki dampak yang menguntungkan pada hubungan kolaborasi, dan manajemen mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sementara menurut Hoffman *et al.*, 2016) memperjelas bahwa dengan tata pemerintahan politik yang baik, iklim bisnis suatu negara, termasuk peraturan masuk, pajak, dan infrastruktur komunikasi menjadi persyaratan utama dalam perluasan kegiatan perusahaan.

Unsur-unsur dalam kelembagaan pemerintah mencakup peran, program, struktur dan sumberdaya. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam

an terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan  
annya sesuai dengan kedudukannya, maka dapat menjalankan suatu



peran (Syarbaini dan Rusdiyanta, 2009). Menurut Horton dan Hunt (1993), peran (role) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton (1968) dinamakan perangkat peran (role set). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (nature) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Program menunjuk pada tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan dari fungsi-fungsi dan jasa-jasa yang merupakan keluaran dari lembaga tersebut. Struktur dirumuskan sebagai proses yang diadakan untuk bekerjanya lembaga tersebut dan bagi pemeliharannya. Pembagian peran dalam organisasi, pola-pola wewenang dan sistem - sistem komunikasi akan mempengaruhi kemampuan lembaga pemerintah untuk melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah diprogramkan. Sumberdaya adalah masukan-masukan fisik, keuangan, manusia dan teknologi. Ketersediaan sumberdaya-sumberdaya secara mantap akan mempengaruhi tiap segi dari kegiatan-kegiatan lembaga.

Pengembangan produktivitas pertanian dan agroindustri perlu didorong dengan menumbuhkan lembaga-lembaga pedesaan yang modern, handal dan

berakar pada budaya masyarakatnya. Putri dan Hidayat (2011); Anantanyu, et al (2011) menyatakan bahwa unsur-unsur yang menunjang efektivitas kelompok tani adalah





sistem nilai, norma, toleransi, kepercayaan, partisipasi dan adanya kerjasama yang diharapkan mampu memberi kontribusi yang nyata dalam memperbaiki taraf hidup harkat dan martabat serta meningkatkan kemandirian petani.

Kelembagaan pelaku usaha merupakan bagian dari kelembagaan dalam pemasaran cengkeh. Kelembagaan pelaku usaha meliputi pedagang saprodi, pedagang besar tingkat kabupaten/kota, pedagang pengumpul perantara tingkat kecamatan dan Perusda. Pedagang besar adalah individu-individu atau pengusaha yang melaksanakan berbagai fungsi pemasaran yang terkait dengan pembelian dan penjualan barang (Anindita *et al.*, 2017).

Pedagang besar dengan kemampuan keuangan mampu memainkan peranan pembayaran langsung dengan baik. Sistem pemasaran pertanian memainkan peranan penting dalam upaya memaksimalkan tingkat konsumsi kepuasan konsumen, pilihan konsumen, dan mutu hidup masyarakat dengan cara memperlancar aliran produk pertanian dari produsen awal ke tangan konsumen akhir (Sa'id dan Intan, 2001). Untuk menciptakan efisiensi perdagangan diperlukan adanya penerapan modal sosial (Sudrajat *et al.*, 2014). yang berdasarkan atas rasa saling percaya dan norma timbal balik (Le *et.al.*, 2019).



efektivitas antar pelaku yang meliputi pemerintah sebagai pengatur, petani sebagai produsen cengkeh serta pelaku usaha sebagai

individu yang berperan dalam kegiatan perdagangan cengkeh harus berkesinambungan untuk mencapai keberlanjutan agribisnis cengkeh. Interaksi kelembagaan yang efektif dapat berfungsi untuk mengatasi masalah koordinasi struktur implementasi. Efektivitas kelembagaan berpengaruh terhadap koordinasi antara kelembagaan, oleh karena itu, memerlukan adanya interkoneksi antar lembaga yang mengacu pada koordinasi dalam pengelolaan agribisnis cengkeh (Nielsen et al., 2013).

## B. Stakeholder

Menurut Ramirez, (1999) dalam Reed *et al.*, (2009) bahwa kata pemangku kepentingan atau stakeholder muncul pada abad ke-17. Selanjutnya teori stakeholder tersebut berkembang dengan definisi-definisi yang lebih sempit dan lebih bersifat instrument sebagai kelompok atau individu dalam suatu organisasi. Selain itu terdapat pula pandangan yang lebih luas dan normatif yang mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai entitas alami yang dipengaruhi oleh kinerja organisasi. Kata stakeholder dalam bahasa Inggris berasal dari kata stake dan holder. Stake berarti kepentingan atau interest dan holder berarti pemegang, pemilik atau pemangku kepentingan. Dengan demikian, kata stakeholder berarti pemegang, pemilik

pemangku kepentingan (Manullang, 2018). Penggunaan istilah



stakeholder semakin populer dan digunakan oleh banyak untuk berbagai kepentingan misalnya pengelolaan sumberdaya alam, sosiologi dan lain-lain.

Istilah stakeholder juga bermakna semua yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan dan tindakan sistem yang dapat bersifat individual, masyarakat atau institusi dalam berbagai ukuran, kesatuan atau tingkat dalam masyarakat. Definisi stakeholder yaitu setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan mendapatkan atau kehilangan sesuatu jika kondisi berubah atau tetap sama (Golder dan Gawler, 2005) Sementara Donaldson dan Preston (1995) bahwa stakeholder adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang sah dalam aspek-aspek prosedural dan substantif dari kegiatan korporasi. Hopley (1996) dalam Tajuddin (2000), mendefinisikan stakeholder sebagai orang atau organisasi yang terlibat dalam suatu kegiatan atau program pembangunan serta orang atau organisasi yang terkena dampak dari kegiatan yang bersangkutan.

Stakeholder dalam pandangan Suporahardjo (2005) adalah orang-orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam sistem, berupa perorangan, komunitas, kelompok sosial atau organisasi yang dipengaruhi atau dipengaruhi oleh sistem. Dalam konteks sektor pertanian, secara organisasi stakeholder dapat dikategorikan dalam lingkup yang lebih luas yakni



pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta dan komunitas. Secara perorangan atau kelompok, stakeholder mencakup aparat pemerintah (lingkup nasional hingga lokal), peneliti, penyuluh, petani, kontak tani, pemilik, penggarap, buruh tani, pedagang (sarana produksi dan hasil pertanian), penyedia jasa (alat dan mesin pertanian dan transportasi) dan pihak-pihak terkait lainnya (Iqbal, 2007). Pengelolaan multipihak stakeholder dapat mengintegrasikan kepentingan para pihak yang terlibat dan mendistribusikan informasi secara merata (Ilham et, al., 2016).

### C. Keberlanjutan Cengkeh

Sejarah munculnya gagasan pembangunan berkelanjutan lahir dari proses pembangunan dan pertumbuhan yang tinggi, namun mengabaikan persoalan lingkungan ekologi. Jika pembangunan hanya menghasilkan perubahan dan pertumbuhan ekonomi saja, maka kebutuhan dan hak-hak dasar manusia di bidang sosial dan ekologi belum tentu terpenuhi. Daly (1992) mengatakan bahwa semua akan ambruk (*collapses*), tidak ada kemajuan tanpa ekonomi, dan tidak ada pembangunan tanpa fungsi sosial.

Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sejak sudah lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah keberlanjutan (*sustainability*) sendiri

muncul beberapa dekade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada tahun 1798 yang



mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat (Rahadian, 2016).

Inti dari visi pembangunan yang berkelanjutan adalah kombinasi antara kepedulian (kebutuhan) pembangunan tradisional dengan perhatian lingkungan (keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut (Death, 2014). Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan masa kini tanpa melemahkan kemampuan generasi-generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri.

Pembangunan berkelanjutan menekankan kompatibilitas jangka panjang antara ekonomi, sosial dan lingkungan, sekaligus mengakui kemungkinan persaingan ketiganya dalam jangka pendek. Pembangunan harus menyeimbangkan tujuan dan eksploitasi yang berbeda. Pembangunan harus dilakukan dengan pandangan jangka panjang mengenai implikasinya dan ketidakpastian yang melingkupinya. Kebijakan memastikan bahwa biaya aktivitas satu generasi tidak membahayakan peluang generasi masa depan, karena sistem lingkungan dan sosial tidak mudah dipulihkan setelah rusak. Kestinambungan Ekonomis mencakup persyaratan untuk pertumbuhan ekonomi yang kuat dan tahan lama, seperti melestarikan keuangan stabilitas,

dan inflasi rendah dan stabil, dan kapasitas untuk berinvestasi dan produksi. Kestinambungan Lingkungan berfokus pada pemeliharaan



integritas, produktivitas dan ketahanan biologi dan fisik sistem, dan melestarikan akses ke lingkungan yang sehat. Kestinambungan sosial menekankan pentingnya pekerjaan yang tinggi, jaring pengaman yang mampu beradaptasi dengan perubahan demografi dan struktural utama, keadilan dan partisipasi demokratis dalam pengambilan keputusan (OECD, 2001).

Pembangunan berkelanjutan menekankan hubungan diantara ketiga dimensi, saling melengkapi jangka panjang, dan kebutuhan untuk menyeimbangkannya saat konflik muncul jangka pendek. Pada hakekatnya pertanian yang berkelanjutan adalah kembali ke alam (*back to nature*) yakni sistem pertanian yang tidak merusak, serasi, selaras, dan seimbang dengan lingkungan atau pertanian yang patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah alamiah (Salikin, 2003)

Keberlanjutan adalah kemampuan dari sebuah sistem untuk menghasilkan output yang cukup sehingga input cukup diberikan untuk meneruskan produksi. Kriteria yang harus dipenuhi dalam keberlanjutan diantaranya : 1). Mampu mengatasi biaya atau bahkan menjadi swadana (self financing). 2). Mampu mensuplay aliran manfaat terus-menerus 3). Mampu bertahan hidup dari waktu ke waktu sebagai unit teridentifikasi (Brinkerhoff dan Smith, 1990).

...kmana, (tanpa tahun), bahwa pertanian berkelanjutan adalah sebuah ... yang merupakan sistem pertanian dengan memberdayakan petani



untuk bekerja sejalan dengan proses-proses alami untuk melindungi sumberdaya seperti tanah dan air, sambil meminimumkan dampak dari limbah terhadap lingkungan. Pada saat yang sama, sistem pertanian menjadi lebih tahan (*resilient*), mengatur diri sendiri dan keuntungannya dapat dipertahankan. Sistem pertanian berkelanjutan harus memenuhi tiga prinsip dasar seperti yang dijelaskan berikut :

1. Keberlanjutan Ekonomi. Agar sebuah kegiatan bisa berlanjut, sebuah usahatani harus secara ekonomi menguntungkan. Pertanian berkelanjutan dapat meningkatkan kelayakan ekonomi melalui banyak cara. Secara singkat, meningkatkan pengelolaan tanah dan rotasi tanaman akan meningkatkan hasil, dalam jangka pendek maupun jangka panjang, karena meningkatkan kualitas tanah dan ketersediaan air, seperti juga menimbulkan manfaat lingkungan. Kelayakan ekonomi juga dapat dicapai dengan mengurangi penggunaan peralatan mesin, mengurangi biaya pupuk kimia dan pestisida tergantung pada karakteristik dari sistem produksinya.
2. Keberlanjutan Lingkungan. Pertanian berkelanjutan sering digambarkan sebagai kegiatan yang layak secara ekologis yang tidak atau sedikit memberikan dampak negatif terhadap ekosistem alam, atau bahkan memperbaiki kualitas lingkungan dan sumberdaya alam pada mana

tan pertanian bergantung. Biasanya hal di dicapai dengan cara melindungi, mendaur-ulang, mengganti dan/atau mempertahankan basis sumberdaya alam seperti tanah, air, keanekaragaman hayati dan kehidupan



liar yang memberikan sumbangan terhadap perlindungan modal alami. Pupuk sintetik dapat digunakan untuk melengkapi input alami jika diperlukan. Dalam pertanian berkelanjutan, penggunaan bahan kimia yang dikenal berbahaya bagi organisme tanah, struktur tanah dan keanekaragaman hayati dihindari atau dikurangi sampai minimum.

3. Keberlanjutan Sosial. Keberlanjutan sosial berkaitan dengan kualitas hidup dari mereka yang bekerja dan hidup di pertanian, demikian juga dengan masyarakat di sekitarnya. Hal ini mencakup penerimaan atau pendapatan yang setara bagi stakeholder yang berbeda dalam rantai produksi pertanian. Dalam konteks pengangguran yang tinggi, pertanian berkelanjutan mempromosikan pembagian nilai tambah pertanian bagi lebih banyak anggota masyarakat melalui lebih banyak penggunaan tenaga kerja yang tersedia, dan akan meningkatkan kohesi dan keadilan sosial. Perlakuan yang layak terhadap pekerja dan memilih untuk membeli bahan-bahan secara lokal daripada membeli dari tempat jauh, juga merupakan elemen dari keberlanjutan sosial.

Monasinghe (1993), mengemukakan bahwa konsep pertanian berkelanjutan berorientasi pada tiga dimensi keberlanjutan, yaitu: keberlanjutan usaha ekonomi (*profit*), keberlanjutan kehidupan sosial manusia

, dan keberlanjutan ekologi alam (*planet*) meliputi :

dimensi ekonomi berkaitan dengan konsep maksimisasi aliran pendapatan yang dapat diperoleh dengan setidaknya mempertahankan





asset produktif yang menjadi basis dalam memperoleh pendapatan tersebut. Indikator utama dimensi ekonomi ini ialah tingkat efisiensi dan daya saing, besaran dan pertumbuhan nilai tambah dan stabilitas ekonomi. Dimensi ekonomi menekankan aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia baik untuk generasi sekarang ataupun mendatang.

2. Dimensi sosial, adalah orientasi kerakyatan, berkaitan dengan kebutuhan akan kesejahteraan sosial yang dicerminkan oleh kehidupan sosial yang harmonis (termasuk tercegahnya konflik sosial), reservasi keragaman budaya dan modal sosio-kebudayaan, termasuk perlindungan terhadap suku minoritas. Untuk itu, pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan berusaha dan pendapatan, partisipasi sosial politik dan stabilitas sosial budaya merupakan indikator-indikator penting yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Dimensi lingkungan alam, menekankan kebutuhan akan stabilitas ekosistem alam yang mencakup sistem kehidupan biologis dan materi alam.

Tiga pandangan berkelanjutan yang berbeda. Pandangan pertama adalah berkelanjutan sebagai kecukupan pangan, yang mengkaji untuk

memaksimalkan produksi pangan dalam kendala-kendala keuntungan. Pandangan kedua adalah berkelanjutan sebagai pekerjaan mengurus yang mengendalikan kerusakan lingkungan. Pandangan ketiga adalah



berkelanjutan sebagai kependudukan, yang diartikan dalam istilah pemeliharaan dan rekonstruksi sistem pedesaan yang dapat berlangsung secara ekonomis dan sosial (Samekto, 2011). Sedangkan tujuan keberlanjutan adalah memberikan sebuah kesempatan kepada pelaku usaha tani untuk memelihara sumberdaya alam, memberikan pelayanan terhadap ekosistem, memberikan manfaat lingkungan termasuk ekosistem pertanian, sistem produksi utama bagi kebutuhan pangan (Declerk et al., 2016).

Keberlanjutan juga harus dilihat secara keseluruhan untuk membahas permasalahan terutama mengenai kebijakan, kepemilikan, aktor yang terlibat, peran dan partisipasi masyarakat sehingga masalah dapat diselesaikan secara kompleksitas. Keberlanjutan meliputi hal yang kompleks terlebih lagi ketika harus mengintegrasikan berbagai informasi dari aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Begitu pula dengan pentingnya menelaah keberlanjutan agribisnis cengkeh dari aspek ekologi (lingkungan), sosial dan ekonomi agar dapat menjamin pemenuhan kebutuhan bagi generasi mendatang. Keberlanjutan pembangunan pertanian dari aspek ekologi meliputi upaya mempertahankan kualitas sumberdaya alam, meningkatkan kemampuan agroekosistem, mempertahankan kesehatan tanah dan kesehatan tanaman melalui proses biologis, memanfaatkan sumberdaya lokal dan efisiensi energi, mencegah

aran, menggunakan sumberdaya yang dapat diperbarui (Darma, keberlanjutan cengkeh dari aspek ekologi dengan melihat pengelolaan yang berarti bahwa lahan yang diusahakan tidak mengalami



degradasi dan dapat dimanfaatkan secara lestari oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Selain itu keberlanjutan aspek ekologi ditinjau dari sistem pemeliharaan tanaman secara baik, antara lain tindakan konservasi, perawatan fisik tanaman, kondisi di sekitar tanaman dan pemeliharaan kesuburan tanah (Novita et al., 2012).

Keberlanjutan cengkeh dari aspek sosial meliputi sumberdaya manusia meliputi keterampilan dan tingkat pendidikan, peran serta masyarakat yang dibina oleh institusi yang mapan masyarakat, status kepemilikan lahan, nilai kultural dan budaya yang agraris pada masyarakat (Darma, 2015). Keberlanjutan agribisnis cengkeh dari aspek ekonomi yakni melihat terpenuhinya kesejahteraan petani baik fisik maupun non fisik, kondisi pasar yang menguntungkan, meningkatnya keuntungan hasil produksi yang diperoleh petani yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (Ala, 2015).

Menurut Haris (2000) dalam Rivai dan Anugerah (2011) melihat bahwa konsep keberlanjutan dari tiga aspek: 1). keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian

industri.2). keberlanjutan lingkungan mampu memelihara sumber daya alam, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan karbon. 3). keberlanjutan sosial diartikan sebagai sistem yang mampu



mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

#### D. Agribisnis Cengkeh

Agribisnis merupakan kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran produk-produk yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Konsep agribisnis sebenarnya adalah suatu konsep yang utuh, mulai dari proses produksi, mengolah hasil, pemasaran dan aktivitas lain yang berkaitan dengan pertanian. Yang dimaksud dengan ada hubungannya dengan pertanian dalam arti yang luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian baik kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian (Soekartawi, 2010).

Sedangkan Downey dan Erickson (1989) membagi sistem agribisnis menjadi 3 (tiga) sektor yang saling terkait, yaitu sektor masukan (input), sector usahatani (farm) dan sector keluaran (output). Sementara Siswati et al., (2015), menegaskan bahwa kegiatan usaha agribisnis meliputi empat subsistem yaitu :

1. Sub sistem agribisnis hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menyediakan sarana produksi bagi pertanian seperti pupuk, pestisida, mesin atau peralatan, benih, bibit. Perusahaan agribisnis hulu dapat melakukan pelayanan melalui pelayanan pelayanan



bermutu pada usahatani , memberikan bimbingan teknis produksi ,memberikan bimbingan manajemen dan hubungan agribisnis ,memfasilitasi pembelajaran pelatihan bagi petani ,memberi dan menjaring informasi agribisnis praktis untuk serta dapat mengembangkan kerja bisnis (kemitraan).

2. Subsistem produksi tani seperti kegiatan ekonomi menggunakan sarana produksi menggunakan subsistem agribisnis hulu untuk menghasilkan produk pertanian primer seperti ; usaha tanaman pangan, tanaman hortikultura, usaha tanaman obat - obatan. Usaha tanaman perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan.. Subsistem usaha tani sebagai produsen pertanian berfungsi melakukan teknis produksi agar produksinya dipertanggung jawabkan baik kualitas maupun kuantitas.
3. Subsistem agribisnis hilir merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah produk pertanian primer menjadi produk olahan beserta kegiatan perdagangan di pasar domestik maupun di pasar internasional. Kegiatan ekonomi yang termasuk sub sistem agribisnis hilir antara lain industri pengolahan makanan ,industri pengolahan serat (kayu, kulit, karet, jerami, sutera ) industri jasa , industri farmasi dan bahan kecantikan. Subsistem perusahaan agribisnis hilir berfungsi melakukan pengolahan lebih lanjut (baik primer, sekunder, tertier) untuk mengurangi susut nilai dan untuk meningkatkan mutu



produk agar dapat memenuhi kebutuhan dan selera konsumen ,serta memperlancar pemasaran melalui perencanaan sistem pemasaran yang baik.

4. Subsistem lembaga penunjang merupakan seluruh kegiatan menyediakan jasa-jasa dalam kegiatan agribisnis yang meliputi: lembaga keuangan, lembaga penelitian dan pengembangan jasa transportasi, lembaga pendidikan dan lembaga pemerintah

Pengembangan agribisnis cengkeh (*Syzygium aromaticum* L) sebagai salah satu agribisnis perkebunan yang sebagian besar diusahakan oleh perkebunan rakyat memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara dan memiliki harga jual yang bersaing (Perdana, 2015 dan Hariyani , 2016). Cengkeh termasuk jenis tumbuhan perdu yang dapat memiliki batang pohon besar dan berkayu keras, cengkeh mampu bertahan hidup puluhan bahkan sampai ratusan tahun, tingginya dapat mencapai 20 -30 meter dan cabang-cabangnya cukup lebat. Cabang-cabang dari tumbuhan cengkeh panjang dan dipenuhi oleh ranting-ranting kecil yang mudah patah. Mahkota atau juga lazim disebut tajuk pohon cengkeh berbentuk kerucut. Daun cengkeh berwarna hijau berbentuk bulat telur memanjang dengan bagian ujung dan pangkalnya menyudut, rata -rata mempunyai ukuran lebar berkisar 2-3 cm dan panjang

mpa tangkai berkisar 7,5 -12,5 cm. Bunga dan buah cengkeh akan pada ujung ranting daun dengan tangkai pendek serta bertandan. Pada masih muda bunga cengkeh berwarna keungu-unguan, kemudian



berubah menjadi kuning kehijau-hijauan dan berubah lagi menjadi merah muda apabila sudah tua. Sedang bunga cengkeh kering berwarna coklat kehitaman dan berasa pedas, sebab mengandung minyak atsiri. (Nurdjannah, 2016).

Rukmana dan Yudirachman, (2016), bahwa teknik budidaya cengkeh dimulai dari persyaratan tumbuh hingga penanganan pasca panen tanaman cengkeh sebagai berikut :

#### 1. Persyaratan Tumbuh

Tanah yang sesuai untuk tanaman cengkeh adalah gembur, solum tanah tebal (minimal 1,5 meter) serta kedalaman air tanah lebih dari 3 meter dari permukaan tanah, jenis tanah yang sesuai adalah latosol, podsolik merah, mediteran dan andosol. Keasaman tanah (pH) optimum berkisar antara 5,5 – 6,5. Faktor iklim yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan dan produksi cengkeh meliputi ketinggian tempat dari permukaan laut (dpl) yang optimal 200 – 600 m dpl, kelembapan udara (rh) antara 60% – 70%, curah hujan antara 1500 – 2.500 mm/tahun, intensitas penyinaran 60% dan tidak terjadi angin kencang sepanjang tahun.

#### 2. Penanaman

Kegiatan penanaman dimulai dari persiapan lahan, pengaturan jarak tanam sampai pada penerapan pola tanam yang diterapkan dalam penanaman cengkeh. Adapun langkah-langkah kegiatan penanaman cengkeh sebagai berikut : 1). Persiapan lahan diawali dengan pengolahan lahan yang dilanjutkan dengan pengolahan tanah. Selanjutnya



pembuatan lubang tanam, ukuran yang biasa digunakan panjang, lebar dan kedalaman masing – masing berkisar antara 60 – 80 cm (60 x 60 x 60 cm atau 80 x 80 x 80 cm atau 80 x 80 x 60 cm). Selanjutnya 2 minggu – 1 bulan sebelum tanam diberi pupuk kandang sebanyak 5 – 10 kg/ pohon. Untuk mengatur kelebihan air perlu dibuat saluran drainase yang cukup. 2). Jarak tanam yang biasa digunakan pada penanaman cengkeh tidak sama tergantung pada ketinggian dan kemiringan tanah. Jarak tanam yang biasa digunakan adalah sekitar 6 m x 7 m, 7 m x 8 m atau 8 m x 8 m = 156 pohon. Penanaman dilaksanakan pada awal musim hujan. 3). Pola tanam campuran (*polykuntur*) dengan sistem tanam pagar, yaitu memperkecil jarak tanam dalam baris (Timur-Barat) misalnya 12 m x 5 m atau 14 m x 6 m sehingga tersedia ruangan untuk tanaman sela/ campuran. Tanaman campuran dapat dilakukan pada tanaman yang belum produktif dan atau kurang produktif.

### 3. Pemeliharaan Tanaman.

Pemeliharaan tanaman cengkeh merupakan periode yang panjang, yaitu selama tanaman yang diusahakan tersebut dianggap masih menguntungkan secara ekonomis. Pengelolaan Lahan dan tanaman cengkeh sebagai berikut : 1). Menggemburkan tanah dan sanitasi kebun. Tanaman cengkeh umur 1 – 5 tahun merupakan periode yang kritis, sekitar 10 – 30 % tanaman yang telah

di lapangan mengalami kematian atau perlu diganti/disulam karena berbagai sebab, seperti hama penyakit, kekeringan, kalah bersaing dengan tanaman lain atau penyebab lainnya. Penggemburan tanah disekeliling tanaman





sekitar perakaran dengan mencangkul dangkal ( $\pm 10$  cm) sekurangnya 2 kali setahun, pada awal dan akhir musim hujan sekaligus sebagai persiapan pemupukan. Membersihkan Gulma/alang-alang sampai akar-akarnya dengan cangkul/garpu atau dengan penyemprotan herbisida. 2). Mengatur naungan, pada stadia awal pertumbuhan, tanaman cengkeh memerlukan naungan yang cukup agar pertumbuhannya dapat optimal, berupa naungan buatan/sementara. Setelah tanaman cengkeh berumur 5 tahun naungan alami (pohon peneduh) sama sekali dihilangkan, karena tanaman sudah tahan terhadap semua pengaruh dari luar. 3). Kegiatan menyulam tanaman; waktu penyulaman sebaiknya dilakukan pada musim hujan, yaitu untuk menghindari kematian tanaman karena kekurangan air. Bibit sulaman yang digunakan berasal dari sumber benih dan umur yang tidak jauh berbeda dengan tanaman yang telah ditanam. 4). Kegiatan menyiram: pada awal pertumbuhan, tanaman cengkeh memerlukan kondisi tanah yang lembab, sehingga pada musim kemarau perlu adanya penyiraman. Sedangkan tanaman dewasa penyiraman kurang diperlukan lagi, kecuali pada kondisi iklim ekstrim kering 5). Kegiatan pemasangan mulsa; untuk menjaga kelembaban tanah disekitar tanaman dan memberikan kondisi lebih baik bagi pertumbuhan akar. Kegiatan pemasangan mulsa dilakukan menjelang musim kemarau 6). Kegiatan

kan; tujuan pemupukan adalah untuk memperbaiki pertumbuhan dan meningkatnya produksi cengkeh setelah panen. Pemupukan cengkeh dilakukan : 1).Berdasarkan pola penyebaran akarnya,



penempatan pupuk pada tanaman cengkeh dilakukan dibawah proyeksi tajuk dan bagian dalam tajuk. 2). Jenis pupuk yang diberikan dapat berupa pupuk organik (pupuk kandang atau kompos) dan pupuk anorganik, baik tunggal maupun berupa pupuk majemuk dalam bentuk butiran maupun tablet, diberikan dalam 8 lubang tugal sedalam 10 – 15 cm. Pupuk tablet hanya diberikan setahun sekali, yaitu pada awal musim hujan

#### 4. Pengendalian Hama dan Penyakit

Pengendalian hama dan penyakit sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan panen cengkeh, oleh karena itu perlu diketahui beberapa hama dan penyakit yang menyerang tanaman serta tindakan pencegahannya. Beberapa hama dan penyakit yang menyerang tanaman cengkeh adalah sebagai berikut :

a). Kutu daun ( *Coccus viridis* ) Bagian yang diserang : ranting muda, daun muda. Gejala : Pertumbuhan yang dihisapnya akan terhenti misal ranting mengering, daun dan bunga kering dan rontok. Cara pencegahannya : menggunakan pentana ditambah aero 810 atau natural bvr

b). Penggerek ranting/batang ( *Xyleborus sp* ). Bagian tanaman yang diserang : ranting/batang. Gejala : Liang gerekkan berupa lubang kecil, serangan hebat menyebabkan ranting/batang menjadi rapuh dan mudah

Cara pengendaliannya adalah memangkas ranting/batang yang terinfeksi, pencegahan menggunakan pestona atau natural bvr.



c). Kepik Helopeltis (*Helopeltis sp*) Bagian yang diserang : pucuk atau daun muda. Gejala : Biasanya pucuk akan mati dan daun muda berguguran. Cara pencegahannya adalah menyemprotkan natural bvr atau pestona.

d). Penyakit mati bujang (*Xylemlimited bacterium*). Bagian tanaman yang diserang adalah perakaran, ranting-ranting muda. Gejalanya yakni matinya ranting pada ujung-ujung tanaman. Gugurnya daun diikuti dengan matinya ranting secara bersamaan. Cara Pengendaliannya adalah mengatur drainase dengan baik, penggemburan tanah, cara pencegahannya adalah mencampurkan poc nasa, hormonik, natural glio

e). Penyakit busuk akar (*Pytium rhizoctonia dan Phytophthora*). Bagian tanaman yang diserang adalah perakaran. Gejalanya pada pembibitan tanaman mati secara tiba-tiba, pada tanaman dewasa daun mengering mulai dari ranting bagian bawah. Cara pengendaliannya adalah apabila serangan telah ganas maka tanaman yang terserang dibongkar dan dimusnahkan, memberikan tepung belerang 200 gr pada lubang bekas tanaman secara merata, mengisolasi tanaman atau daerah yang terserang dengan membuat saluran isolasi, memperbaiki drainase, menggunakan natural glio pada awal penanaman untuk pencegahan.

## 5. Panen

giatan pemanenan sangat mempengaruhi kualitas produksi cengkeh. Utama cengkeh adalah bunga. Bunga cengkeh muncul beberapa saat daun-daun pucuk keluar sebagai awal datangnya musim panen



cengkeh. Umumnya cengkeh pertama kali berbuah pada umur 4-7 tahun. Untuk memperoleh mutu yang baik bunga cengkeh dipetik saat matang petik, yaitu saat kepala bunga kelihatan sudah penuh tetapi belum membuka. Bunga cengkeh dapat dipanen apabila sudah memenuhi persyaratan berikut :

- 1). Telah berumur kurang lebih 6 bulan sejak bakal bunga keluar
- 2). Terdapat 1- 2 bunga mekar pada setiap tandan
- 3). Bunga berubah warna dari hijau menjadi kuning.

Matang petik setiap tanaman umumnya tidak serempak dan pemetikan dapat diulangi setiap 10-14 hari selama 3-4 bulan.

#### 6. Penanganan Pasca Panen

Kegiatan penanganan pasca panen meliputi beberapa tahap sebagai berikut :

- 1). Sortasi buah yaitu memisahkan bunga dari tangkainya dan tempatkan pada tempat yang berbeda.
- 2). Pemeraman dilakukan selama 1 hari dilakukan untuk memperbaiki warna cengkeh menjadi coklat mengkilat.
- 3). Pengeringan dengan mesin pengering yang menggunakan kayu bakar atau bahan bakar minyak. Selain itu pengeringan dengan cara alami yaitu menjemur cengkeh saat terik matahari pada lantai beton agar kadar air menjadi 12-14 persen sehingga dapat disimpan dan aman dari jamur
- 4). Sortasi. Pada tahap ini memisahkan cengkeh dari kotoran dengan cara menampi. Kemudian

kan cengkeh yang sudah bersih kedalam karung dan menjahit kedua  
rung.

Pemasaran



Kegiatan pemasaran dalam agribisnis cengkeh melibatkan beberapa lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan agribisnis dari produsen kepada konsumen akhir serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Tugas lembaga pemasaran adalah menjalankan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi keinginan konsumen semaksimal mungkin (Sudiyono, 2001). Buah cengkeh dapat dipasarkan apabila matang secara fisiologis setelah dilakukan penjemuran. Indikator buah yang bisa dijual adalah tingkat kadar air dan kebersihan. Penjualan hasil produksi cengkeh dapat dilakukan di rumah petani sendiri dengan cara didatangi oleh pedagang yang berkeliling dari kampung ke kampung, menjual ke pedagang yang ada di desa, di jual ke kota atau menunggu harga lebih tinggi baru bisa di jual (Kario, 2014). Pihak swasta diharapkan dapat ikut investasi dalam agribisnis cengkeh yang meliputi agribisnis hulu dalam penangkaran benih, sektor “*on farm*” pendirian perkebunan besar (PBS) dalam rangka peremajaan (*replanting*) serta agribisnis hilir di bidang industri penyulingan minyak, industri makanan dan farmasi serta pengolahan pestisida nabati cengkeh. (Litbang Pertanian, 2007).

### E. Kerangka Pemikiran



Perkonektivitas kelembagaan bertujuan untuk mengkaji tentang peran beberapa kelembagaan yang terlibat dalam pengembangan

agribisnis cengkeh untuk mendukung keberlanjutan agribisnis cengkeh. Kelembagaan yang terlibat dalam agribisnis cengkeh meliputi kelembagaan pemerintah (Dinas Pertanian, Deprindagkop dan UKM, BPP, Perumda, dan Kantor Kelurahan), kelembagaan petani (Kelompok Tani dan Gapoktan), kelembagaan pelaku usaha (Pedagang Saprodi dan Pedagang Pengumpul Hasil Pertanian) Ketiga kelembagaan ini ditelaah dengan melihat unsur-unsur sumberdaya, organisasi dan norma atau aturan yang saling berkaitan demi tercapainya tujuan lembaga. Unsur sumberdaya yang dimaksud mencakup keseluruhan sumberdaya kelembagaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya keuangan, sumberdaya teknologi dan sumberdaya informasi. Unsur organisasi yang dimaksud adalah struktur organisasi, peran dan tanggungjawab. Unsur norma yang dimaksud mencakup kesepakatan-kesepakatan yang dipatuhi dalam lembaga serta gambaran modal sosial yang dimiliki oleh pelaku dalam kelembagaan. Konektivitas kelembagaan dalam upaya keberlanjutan agribisnis cengkeh dapat dipahami dengan menggunakan teori jaringan dan jejaring. Sasaran utama teori jaringan dalam mempelajari struktur sosial adalah menganalisis jejaring pola ikatan yang menghubungkan antar kelompok.

Keterikatan atau konektivitas antar kelompok menunjukkan adanya

n dari beberapa individu atau kelompok untuk bersama-sama bekerja

encapai tujuan bersama. Untuk memahami adanya konektivitas antar



lembaga diperlukan aspek-aspek yang menjadi dasar terciptanya hubungan sosial. Menurut Granoveter (1991), bahwa perlu adanya keterlekatan perilaku dalam hubungan sosial melalui jaringan sosial yang terjadi dalam kehidupan sosial. Menurut Lawang (2004), bahwa kepercayaan, kerjasama dan norma merupakan faktor pengikat terjadinya hubungan sosial. Adanya rasa saling percaya yang dipertahankan oleh norma antara masing-masing lembaga akan mempererat ikatan hubungan yang terjalin. Kerjasama yang tercipta akan memudahkan pencapaian tujuan bersama. Norma merupakan ikatan atau simpul yang mengatur dan menjaga hubungan yang terjalin.

Menurut Ritzer dan Goodman (2012) bahwa informasi sangat memperlancar terjadinya konektivitas kelembagaan. Adanya saling memberi dan menerima informasi akan mempermudah komunikasi yang terjalin diantara lembaga yang terlibat. Pada dasarnya konektivitas kelembagaan terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu.

Kajian konsep kelembagaan menitikberatkan pada pelaksanaan nilai, norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam pengelolaan agribisnis cengkeh.

Adanya suatu konektivitas antara kelembagaan yang terkait memerlukan unsur-unsur yang meliputi : keterlekatan, kepercayaan, kerjasama,



norma dan informasi. Mekanisme interaksi seperti norma, ide dan insentif dapat meningkatkan interaksi kelembagaan yang efektif (Nielsen et al., 2013).

Kelembagaan pemerintah senantiasa berupaya mengembangkan kapasitas petani dan kelembagaan kelompok tani dalam upaya meningkatkan daya saing petani dalam pengembangan sistem agribisnis di Indonesia. Kapasitas petani dapat meningkat sejalan dengan partisipasi mereka dalam kelembagaan petani. Kapasitas petani dan partisipasi mereka dalam kelembagaan petani akan mendorong kapasitas kelembagaan menjadi lebih efektif. Konektivitas antara kelembagaan petani dengan kelembagaan pemerintah menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan pertanian. Unsur-unsur yang mengikat kelembagaan petani dan kelembagaan pemerintah meliputi: program, aturan, kepentingan, kepercayaan, informasi dan kerjasama. Unsur-unsur pengikat ini diharapkan mampu menciptakan hubungan koordinasi yang dinamis antara kelembagaan petani dan kelembagaan pemerintah. Sedangkan konektivitas antara kelembagaan pemerintah dengan kelembagaan pelaku usaha berorientasi kepada kegiatan pemasaran cengkeh. Unsur-unsur pengikat kedua lembaga ini diantaranya: aturan, kepentingan, program dan kerjasama. Koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah dan lembaga pelaku usaha akan dapat menciptakan iklim

yang stabil. Bentuk konektivitas antara kelembagaan petani dengan lembaga pelaku usaha yang harmonis menjadi salah satu penentu suksesnya pembangunan agribisnis. Unsur-unsur pengikat kedua lembaga





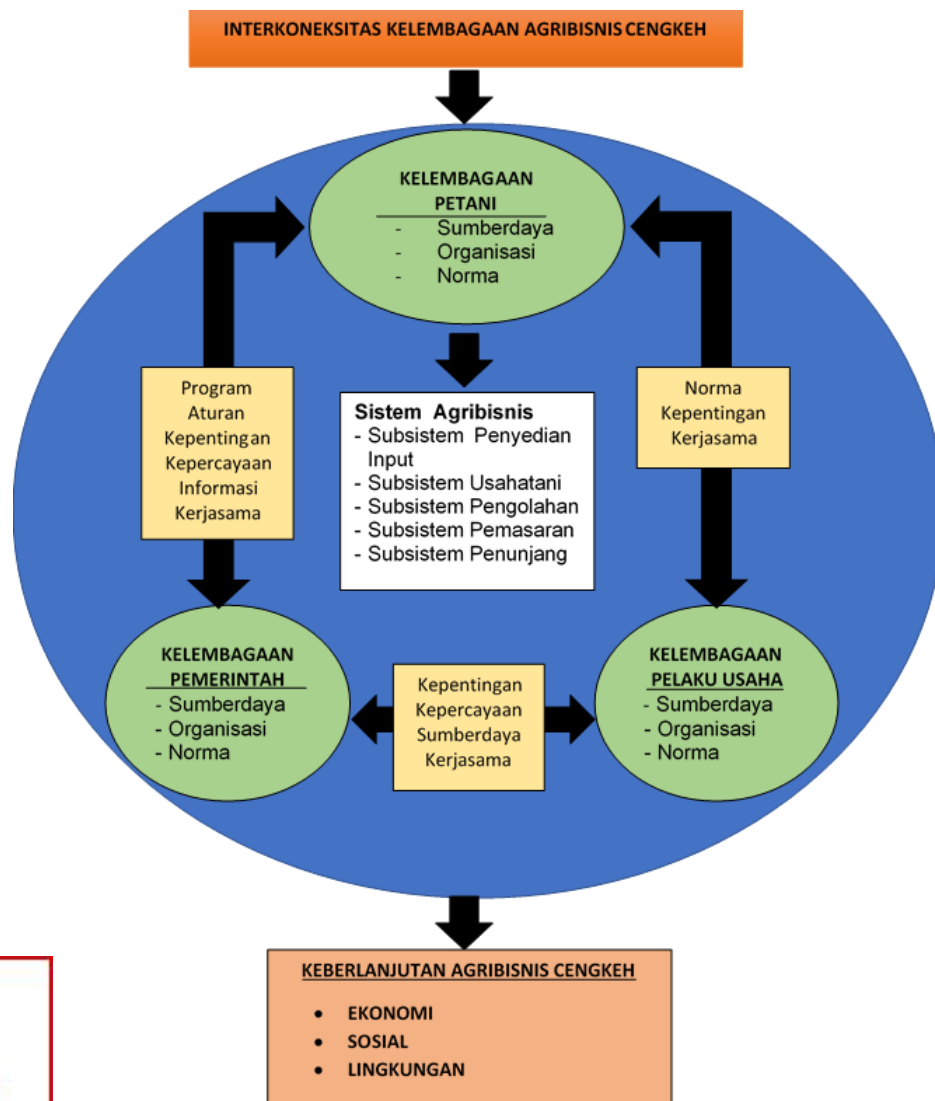
ini meliputi:kepentingan, kepercayaan, norma, sumberdaya dan kerjasama. Keharmonisan hubungan antara petani dan pedagang akan berdampak terhadap kesejahteraan hidup petani. Mekanisme interaksi seperti norma, ide dan insentif dapat meningkatkan interaksi kelembagaan yang efektif (Nielsen et al., 2013).

Interaksi kelembagaan yang efektif akan dapat menjamin keberlanjutan agribisnis cengkeh dimasa yang akan datang. Berdasarkan konsep kelembagaan, maka pengembangan produktivitas agribisnis cengkeh diibaratkan sebagai arena permainan dimana para aktor baik itu petani dan pemerintah dalam aktivitas usaha tani cengkeh, dan melibatkan pihak pelaku bisnis baik itu pedagang pengumpul maupun badan usaha lainnya dalam kegiatan pemasaran. Dengan terciptanya konektivitas kelembagaan yang harmonis akan dapat mencapai keberlanjutan agribisnis cengkeh. Dimensi keberlanjutan agribisnis cengkeh meliputi: dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan membutuhkan dukungan peran kelembagaan dari semua pemangku kepentingan baik itu pemerintah, petani dan pelaku bisnis. Dimensi ekonomi menekankan aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia baik untuk generasi sekarang ataupun mendatang. Dimensi sosial, adalah orientasi kerakyatan, berkaitan dengan kebutuhan akan kesejahteraan sosial yang

kan oleh kehidupan sosial yang harmonis (termasuk tercegahnya sosial), reservasi keragaman budaya dan modal sosio-kebudayaan,



termasuk perlindungan terhadap suku minoritas. Dimensi lingkungan alam, menekankan kebutuhan akan stabilitas ekosistem alam yang mencakup sistem kehidupan biologis dan materi alam. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 5 berikut :



### **Gambar 5.** Kerangka Konseptual Penelitian

Interkonektivitas kelembagaan dapat mewujudkan keberlanjutan agribisnis cengkeh. Dimensi ekonomi mencakup tingkat pertumbuhan dan pendapatan yang diperoleh petani cengkeh. Dimensi sosial meliputi pemerataan kesejahteraan hidup petani cengkeh. Dimensi lingkungan meliputi: sanitasi lingkungan, industri yang lebih bersih dan rendah emisi, dan kelestarian sumberdaya alam.

### **F. Defenisi Konsep**

- Kelembagaan adalah perilaku terpola berdasarkan norma atau aturan main (role of the game) yang dipatuhi bersama dalam organisasi atau struktur masyarakat.
- Kelembagaan meliputi aturan main (role of the game) dan struktur organisasi yang diterapkan oleh suatu lembaga.
- Aturan adalah kebijakan, peraturan perundang-undangan, regulasi dan kesepakatan bersama dalam masyarakat.
- Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) yang meliputi peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan dan regulasi, peran kelompok tani sebagai wadah kebersamaan petani dalam pengelolaan produksi, peran pelaku usaha sebagai agen pemasaran agribisnis cengkeh.

na adalah ketentuan yang berisi perintah-perintah atau larangan-  
ngan yang harus dipatuhi warga masyarakat demi terwujudnya nilai-



nilai dalam bentuk adat istiadat serta kesepakatan-kesepakatan bersama dalam masyarakat.

- Sumberdaya adalah manusia, modal, lahan, informasi, teknologi, keuangan, sarana dan prasarana.
- Stakeholder Primer adalah stakeholder yang memiliki kepentingan langsung terhadap agribisnis cengkeh
- Stakeholder Sekunder adalah stakeholder yang tidak memiliki kepentingan langsung tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan terhadap pengembangan agribisnis cengkeh.
- Stakeholder Kunci adalah stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam pengambilan keputusan.
- Kelembagaan pemerintah mencakup dinas-dinas yang terkait pengaturan pengelolaan agribisnis cengkeh meliputi Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Deprindagkop UKM), Balai Penyuluhan Pertanian.
- Kelembagaan petani mencakup aturan main serta struktur organisasi kelompok tani dan gabungan kelompok tani
- Kelembagaan pelaku bisnis adalah bentuk kelembagaan yang ada dalam kegiatan perdagangan cengkeh, termasuk didalamnya pedagang besar

kat kota, pengumpul pengumpul desa/kelurahan dan perusahaan  
m daerah.



- Keberlanjutan (sustainability) adalah kemampuan dari sebuah sistem untuk menghasilkan output yang cukup sehingga input cukup diberikan untuk meneruskan produksi. Keberlanjutan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberlanjutan agribisnis cengkeh.
- Keberlanjutan ekonomi berkaitan dengan tingkat pendapatan yang dapat diperoleh baik petani dalam kegiatan agribisnis cengkeh.
- Keberlanjutan sosial berkaitan dengan kebutuhan akan kesejahteraan sosial yang ditunjukkan oleh adanya kehidupan yang harmonis dalam pelaksanaan kegiatan agribisnis cengkeh.
- Keberlanjutan lingkungan alam berkaitan dengan kelestarian alam yang tetap lestari yang menitikberatkan pada kebutuhan akan stabilitas ekosistem alam yang mencakup sistem kehidupan biologis dan materi alam.

